

**ISU IDENTITAS AGAMA
DAN SIKAP POLITIK MASYARAKAT KOTA PALEMBANG
PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana S1 dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

OLEH:

Fauzan Agam A.Z.

Nim: 1527020007

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1441 H/2020 M**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Raden Fatah Palembang

di-

tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi. Waborakatu.

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fauzan Agam A.Z. NIM: 1527020007 yang berjudul Isu Identitas Agama dan Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang pada Pemilihan Presiden Tahun 2019, sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Demikian, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi. Wabarokatu.

Palembang, 22 Januari 2020

Pembimbing I



Dr. Kup Budianto, SA., Ag., M.Si
NIP. 197612072007011010

Pembimbing II



Mariatul Qibtiyah, M.A. Si
NIDN. 2011049001

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Fauzan Agam A.Z.
NIM : 1527020007
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Isu Identitas Agama dan Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang pada Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari / Tanggal : Senin, 27 Januari 2020
Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada Program Studi Ilmu Politik.

Palembang, 27 Januari 2020



DEKAN

[Signature]
Prof. Dr. Izomiddin, M.A
NIP: 196206201988031991

TIM PENGUJI

KETUA

[Signature]
Reza Aprianti, M.A
NIP. 19850223201112004

SEKRETARIS

[Signature]
Gita Astrid, S.H.I., M.Si
NIDN. 2025128703

PENGUJI I

[Signature]
Taufik Akhvar, M.Si
NIDN. 197109132000031003

PENGUJI II

[Signature]
Afif Musthofa Kawwami, M.Sos
NIDN. 2027029302

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Fauzan Agam A.Z.
NIM : 1527020007
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 07 Maret 1997
Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Isu Identitas Agama dan Sikap Politik Masyarakat
Kota Palembang pada Pemilihan Presiden Tahun
2019.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 27 Januari 2020



Fauzan Agam A.Z
NIM. 1527020007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan pernah sia-siakan kesempatan, kesempatan bukanlah hal yang kebetulan,
kita harus menciptakannya sendiri”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda ku, sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku. Terimakasih atas do'a dan restu yang telah kalian berikan. Semoga karya sederhana ini, dapat membuat bangga dan memberikan kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang telah kalian lakukan.
2. Kedua Kakak serta Adikku yang telah memberikan semangat dalam pembuatan karya sederhana ini.
3. Pembimbingku Bapak Dr. Kun Budianto, M.Si dan Ibu Mariatul Qibtiyah, MA.Si.
4. Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan (Yuda, Ekik, Yusuf, Edo, Ejak, Rizal, Panji, Husen, Sepka, Dailani, Derry, Ican, dan Tomy) semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah S.W.T. dan semoga kita semua diberikan kesuksesan, amin y.r.a.
5. Terima kasih banyak kepada orang-orang yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

ABSTRAK

Banyak sekali penggunaan isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019 yang berasal dari masing-masing pendukung kedua pasangan calon, isu tersebut seperti sengaja dibentuk untuk mendapatkan simpati masyarakat guna mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Isu identitas agama tersebut pun berkaitan dengan sikap politik masyarakat terutama masyarakat Kota Palembang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan permasalahan yakni “Isu Identitas Agama dan Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang pada Pemilihan Presiden Tahun 2019”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis instrumental atas terbentuknya isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019 dan mendeskripsikan sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Kota Palembang dan tokoh agama Kota Palembang. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu identitas agama pada pilpres tahun 2019 sengaja dibentuk dan dibuat oleh pendukung masing-masing pasangan calon untuk menyerang dan mempertahankan elektabilitas guna mendapatkan suara pada pilpres tahun 2019 terutama suara dari pemilih muslim, isu identitas agama tersebut berkaitan dengan sikap politik masyarakat Kota Palembang dan menunjukkan bahwa ada 3 pengelompokan sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pilpres tahun 2019 yakni, apatis yang merupakan masyarakat yang tidak mau tahu dan tidak tertarik akan hal yang berbau politik, spectator yang merupakan masyarakat yang mengetahui sedikit banyaknya isu pada pilpres 2019 tetapi tidak mendukung secara langsung salah satu paslon pada pilpres 2019, dan gladiator yaitu masyarakat yang mengikuti dan mengetahui serta terlibat secara langsung dalam mendukung dan mengkampanyekan paslon pada pilpres 2019. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai penggunaan identitas agama di dalam perpolitikan terutama di Indonesia.

Kata Kunci: Isu, Identitas Agama, Sikap Politik, Pilpres.

ABSTRACT

There are a lot of uses of the issue of religious identity in the 2019 presidential elections which came from each of the supporters of both pairs of candidates, such issues were deliberately formed to get the sympathy of the public in order to get as many votes as possible. The issue of religious identity is also related to the political attitudes of the people, especially the people of Palembang City. Therefore, researchers are interested in bringing up research with the problem of "Issues of Religious Identity and Political Attitudes of the City of Palembang in the Presidential Election in 2019". The purpose of this study is to find out the instrumentalist analysis of the formation of the issue of religious identity in the 2019 presidential election and describe the political attitudes of the people of Palembang City in the 2019 presidential election. The research method used was descriptive qualitative and data sources in this study were obtained from the people of Palembang City and Palembang City religious leaders. Data collected by in-depth interviews, observation, and documentation with data collection analysis techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the issue of religious identity in the 2019 presidential election was deliberately formed and made by supporters of each pair of candidates to attack and maintain electability in order to get votes in the 2019 presidential election, especially votes from Muslim voters, the issue of religious identity is related to the political attitudes of the community Palembang City and shows that there are 3 groupings of Palembang City's political attitudes in the 2019 presidential election, namely, apathy which is a society that does not want to know and is not interested in political issues, spectators who are people who know a little about the issues at the 2019 presidential election but are not directly support one candidate pair in the 2019 presidential election, and the gladiator is the people who follow and know and are directly involved in supporting and campaigning for the candidate in the 2019 presidential election. So that this research is expected to be a material for further research regarding the use of religious identity in politics especially in Indonesia.

Keywords: Issues, Religious Identity, Political Attitudes, Presidential Election.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR BAGAN..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| KATA PENGANTAR | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| F. Kerangka Pemikiran..... | 11 |
| G. Metodologi Penelitian | 22 |

| | |
|--|----|
| 1. Pendekatan atau Metode Penelitian | 22 |
| 2. Data dan Sumber Data | 22 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 23 |
| 4. Lokasi Penelitian..... | 26 |
| 5. Teknik Analisis Data..... | 26 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 28 |

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 30 |
| 1. Letak Geografis..... | 30 |
| 2. Jumlah Penduduk | 31 |
| 3. Agama | 33 |
| 4. Kelompok Usia..... | 35 |
| 5. Pendidikan..... | 36 |
| 6. Kemiskinan | 37 |
| B. Pemilihan Presiden Tahun 2019..... | 37 |

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Analisis Instrumentalis atas Terbentuknya Isu Identitas Agama pada Pemilihan Presiden Tahun 2019..... | 45 |
| B. Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang pada Pemilihan Presiden Tahun 2019..... | 64 |
| 1. Apatis | 65 |
| 2. Spectator..... | 69 |
| 3. Gladiator..... | 76 |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan81

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA83

DAFTAR LAMPIRAN87

DAFTAR BAGAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran..... | 21 |
|-----------------------------------|----|

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.2 Informan yang telah diwawancarai | 24 |
| Tabel 2.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kec. di Kota Palembang Tahun 2016 | 31 |
| Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Palembang | 32 |
| Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Beragama Islam di Kota Palembang Tahun 2014 | 34 |
| Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Palembang Tahun 2018..... | 35 |
| Tabel 2.5 Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 | 40 |
| Tabel 2.6 Hasil Rekapitulasi Pilpres 2019 Wilayah Kota Palembang | 42 |
| Tabel 2.7 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Palembang | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3.1 Gerakkan 212 | 49 |
| Gambar 3.2 Momen Pasca Penunjukkan Ma'ruf Amin Sebagai Cawapres 01..... | 52 |
| Gambar 3.3 Isu Tuduhan Jokowi PKI (Komunis) | 54 |
| Gambar 3.4 Momen Dukungan GNPf Ulama Kepada Prabowo | 58 |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatu.

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan segala nikmat dan karunianya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul: "Isu Identitas Agama dan Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang pada Pemilihan Presiden Tahun 2019." Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw., sebagai uswatun hasanah dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Penyelesaian skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Sirozi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di UIN Raden Fatah Palembang;
2. Prof. Dr. H. Izomiddin, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang sekaligus dosen penasehat akademik;
3. Dr. Yenrizal, M.Si. selaku Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang yang banyak membantu penulis selama masa perkuliahan;
4. Ainur Ropik, M.Si. selaku Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang yang sering memberikan motivasi bagi penulis;
5. Dr. Kun Budianto, M.Si. selaku Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus pembimbing I yang banyak memberi masukan dalam pembuatan skripsi ini;
6. Dr. Ahmad Syukri, M. Si selaku Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memberikan dorongan dan nasihat bagi mahasiswanya;

7. Afif Musthofa Kawwami, M. Sos selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang yang memberi masukan, dan semangat guna perbaikan penulisan pada skripsi ini;
8. Mariatul Qibtiyah MA.Si. selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini sekaligus memberi saran serta arahan bagi penulis guna penyempurnaan pada skripsi ini;
9. Orang tua, saudara dan keluarga yang tidak pernah berhenti mendo'akan, memberi semangat, serta dukungan bagi penulis;
10. Sahabat-sahabat dan teman dekat seperjuangan yang senantiasa meluangkan waktu untuk bertukar pikiran dan menyemangati penulis;
11. Para informan yang telah membantu peneliti melengkapi hasil penelitian;
12. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar penulisan skripsi dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatu.

Palembang, 22 Januari 2020

Penulis,



Fauzan Agam A.Z
NIM. 1527020007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara teori, salah satu ciri penentu demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana khalayak warga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.¹ Demokrasi digunakan sebagai sistem untuk mengatur dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara suatu masyarakat. Demokrasi memiliki arti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan penting yang sangat menentukan dan sistem politik yang pemimpinnya dipilih dalam proses persaingan multi-partai dan multi-kandidat di mana partai-partai oposisi memiliki peluang untuk meraih kekuasaan atau berpartisipasi dalam kekuasaan. Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).²

Untuk mewujudkan konsep demokrasi diatas maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pemimpin di negara tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, serta para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan

¹ Kenneth Newton dan Jan W. van Deth, (2016), *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta*, Bandung: Nusa Media, h. 43-44.

² Ibid, 50-51

hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi,³ baik pemilihan eksekutif maupun legislatifnya dipilih langsung oleh rakyat di negara tersebut. Negara Indonesia sendiri sudah empat kali melaksanakan pemilihan presiden (eksekutif) dengan sistem pemilihan umum (pemilu) yang dimana dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia sendiri, yakni pada tahun 2004, 2009, 2014, dan yang paling terbaru ialah pada tahun 2019 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Mengenai pemilu di Indonesia, salah satu survei yang dilakukan oleh Sharma, et.al. pada tahun 2010 yang difasilitasi IFES (*International Foundation for Electoral Systems*), menyatakan bahwa 62% orang Indonesia mengatakan bahwa agama memiliki pengaruh penting terhadap politik, dan sisanya 38% mengatakan agama tidak berpengaruh. Survei ini menunjukkan bahwa identitas sangat berpengaruh di dalam perpolitikan Indonesia, sehingga ada istilah menarik yang tumbuh subur di Indonesia yaitu Politik Identitas.⁴

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari

³ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, (2015), *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 45-46.

⁴ Andy Prima Sahalatua, (*Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur Dki Jakarta Periode 2017-2022*), Banten: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, h. 2.

perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah diperkenalkan pada suatu pertemuan Politik Internasional di Wina pada tahun 1994.⁵

Namun pada era saat ini, politik identitas dimaknai secara umum sebagai tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, yang berdasar ras, etnisitas, gender, atau keagamaan.⁶ Artinya, dalam hal ini identitas dipolitisasi (digunakan sebagai alat) untuk mengikuti keinginan dari kepentingan-kepentingan individu, kelompok maupun elite politik.

Politik identitas di Indonesia pun seakan tidak pernah mati dalam arena perpolitikan di negeri ini. Dari beberapa identitas yang ada, seperti ras, suku, agama dan lain-lain, agamalah yang paling dianggap sensitif dan terbukti, momentum pemilihan presiden 2019 yang baru saja usai beberapa waktu yang lalu, adalah contoh nyata bagi pembenaran argumentasi tersebut. Ketika isu identitas agama muncul kemudian dimainkan oleh elite politik maupun masing-masing pendukung untuk mempengaruhi pandangan pemilih terutama pemilih muslim dan bisa saja mempengaruhi pilihan mereka pada pemilihan presiden 2019.

⁵ Ibid, h. 18.

⁶ Ibid, h. 19.

Isu identitas agama pada pemilihan presiden 2019, diawali pada tahun 2016 jauh sebelum pemilihan presiden dilakukan, Ahok pada saat itu sedang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak berhati-hati dan bijak ketika bersinggungan dengan hal-hal yang dianggap sensitif bagi umat islam. Ahok yang beragama kristiani, salah dalam mengartikan Surah Al-Maidah ayat 51 dan dianggap menistakan agama Islam.⁷

Hal ini menjadi perhatian dan kemarahan umat muslim diseluruh Indonesia khususnya DKI Jakarta dan menimbulkan beberapa gerakan yang dilakukan oleh umat muslim, salah satunya yang terbesar adalah gerakan 212 yang telah tercatat dalam sejarah sebagai perkumpulan manusia terbesar di Indonesia, jutaan umat islam tergerak berkumpul, berdoa dan beribadah dengan tertib dan tenang tanpa anarkis.⁸

Sampai menjelang pemilihan presiden tahun 2019, isu ini tak kunjung meredup dan seringkali diperdengarkan dan diperbincangkan. Alhasil, isu ini digunakan kembali pada pemilihan presiden tahun 2019 dan yang menjadi korban dari ini adalah Jokowi pasangan calon 01. Jokowi dituduh bagian kelompok penista agama akibat kedekatan antara Jokowi dan Ahok pada saat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012-2014, pun juga ketidaktegasan Jokowi bersikap sebagai presiden, karena seperti dipaksa memilih apakah beliau berada di pihak umat islam atau Ahok sang penista agama.⁹

⁷ R Hady Syahputra Tambunan, (2019), *Pilpres 2019 dan Agama*, <https://www.kompasiana.com>, diakses pada 30 Agustus 2019.

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,

Kemudian, pembatalan nama Mahfud MD yang digadang-gadang menjadi cawapres nomor urut satu untuk mendampingi Joko Widodo pada saat itu. Pada kenyataannya, Ma'ruf Amin lah yang dipilih sebagai cawapres. Hal ini seolah-olah sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa Jokowi adalah calon presiden yang memuliakan ulama pun dekat dengan umat islam,¹⁰ Ma'ruf Amin yang notabenenya ulama besar dan juga menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada saat itu, menjadikan hal ini seperti ingin meng-*counter* stigma bahwa Jokowi bukan bagian dari Ahok yang merupakan penista agama, dan ingin menarik kembali perhatian umat muslim.

Isu agama lain pada pemilihan presiden tahun 2019 beberapa waktu lalu yakni dari sisi pasangan calon nomor urut dua, diisukan bahwa telah merangkul kelompok-kelompok muslim garis keras yang turut memimpin demonstrasi menuntut pemenjaraan Ahok atas kasus penistaan agama. Tidak hanya itu, Prabowo pun dituduh dengan isu yang mengatakan bahwa keluarga beliau dianggap sebagian non muslim, Prabowo yang adiknya Hashim Djoyo hadikusumo dan Ibunya nonmuslim, dianggap kurang islami bahkan pura-pura islami.¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang secara resmi menyatakan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 dan telah menandatangani pakta

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Vedi Hadiz, (2019), *Pilpres 2019 di Pusaran Oligarki, Politik Uang, dan Isu Agama*, <https://www.matamatapolitik.com>, diakses pada 30 Agustus 2019.

integritas yang diajukan oleh GNPF. Pakta Integritas itu memuat 17 poin kontrak politik yang ditandatangani Prabowo dan perwakilan peserta Ijtima Ulama.¹² Hal ini mengartikan bahwa kubu 02 ingin menunjukkan bahwa Prabowo bukan bagian dari islam radikal maupun kurang islami seperti yang diisukan.

Isu identitas agama diatas inilah yang menjadikan pemilihan presiden tahun 2019 waktu lalu berbeda dari pemilihan presiden pada tahun sebelum-sebelumnya, dan juga menarik perhatian masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Kota Palembang. Salah satu Kota besar dan maju di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 1.643.488 jiwa,¹³ menjadikan Kota Palembang salah satu kota yang cukup mempengaruhi perolehan suara dalam pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu.

Untuk perolehan suara pada pemilihan presiden 2019 di Kota Palembang dimenangkan pasangan Prabowo-Sandi dengan 61,48% suara, sementara Jokowi-Amin meraih 38,52% suara. Pasangan Prabowo-Sandi unggul di 17 kecamatan, sedangkan Jokowi-Maruf Amin hanya unggul di Kecamatan Ilir Timur I. Hasi rekapitulasi menunjukkan bahwa jumlah suara sah sebanyak 909,961 dan suara yang tidak sah sebanyak 15.584, paslon nomor urut satu meraih 350.539 suara dan paslon nomor urut dua meraih 559.422 suara.¹⁴

¹² Mohammad Bernie, (2018), *GNPF Ulama Resmi Dukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019*, <https://tirto.id>, diakses pada 25 Oktober 2019.

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Palembang, (2019), *Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2015-2018*, <https://palembangkota.bps.go.id>, diakses pada 5 November 2019.

¹⁴ Raja Adil Siregar, (2019), *Rekapitulasi KPU di Palembang: Jokowi-Ma'ruf 38,52% Prabowo-Sandi 61,48%*, <https://news.detik.com/>, diakses pada 29 Oktober 2019.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat banyak sekali penggunaan-penggunaan isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019 lalu yang berasal dari masing-masing pendukung kedua pasangan calon. Isu identitas tersebut seperti sengaja di bentuk untuk mendapatkan simpati masyarakat terutama masyarakat Kota Palembang guna mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Penggunaan politik identitas agama pada pilpres 2019 yang lalu dirasakan sangat berpengaruh dalam mendapatkan simpati masyarakat terutama masyarakat Kota Palembang, dibuktikan saat kampanye salah satu calon presiden pada saat itu di Kota Palembang, banyak sekali simbol-simbol agama seperti sobran, peci, gamis dan sebagainya, serta teriakan-teriakan berbau islami terdengar dari masa pendukung yang datang pada waktu itu.

Beberapa masyarakat Kota Palembang pun bervariasi dalam menanggapi isu pada pilpres 2019 lalu terutama isu mengenai identitas agama, isu identitas agama tersebut nantinya berkaitan dengan sikap politik masyarakat Kota Palembang yang dikelompokkan menjadi 3 yakni, apatis, spectator dan gladiator. Apatis merupakan masyarakat Kota Palembang yang tidak mau tahu hal yang berbau politik termasuk pilpres 2019, spectator merupakan masyarakat Kota Palembang yang mengikuti perkembangan pilpres 2019 yang lalu tetapi tidak mendukung secara langsung salah satu paslon, dan gladiator yang merupakan masyarakat Kota Palembang yang mengikuti perkembangan pilpres 2019 serta mendukung

secara langsung salah satu paslon pada pilpres 2019. Peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai Isu Identitas Agama dan Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang pada Pemilihan Presiden Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis instrumentalis atas terbentuknya isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019?
2. Bagaimana sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis instrumentalis atas terbentuknya isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019.
2. Untuk mengetahui sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Yaitu dapat dijadikan bahan untuk memperkaya pengetahuan ilmu politik khususnya politik identitas dan isu identitas serta dapat dijadikan bahan kajian tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para peneliti ilmu politik, para praktisi ilmu politik, dan para pengamat politik mengenai politik identitas terutama isu identitas agama di dalam pemilihan presiden.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang bisa dijadikan rujukan dalam membahas penelitian tentang Isu Identitas Agama dan Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang pada Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Zharfandy dengan judul "*Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013*".¹⁵ Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga faktor politik identitas masih berpengaruh pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013, yaitu hierarkis, polarisasi politik oleh elite lokal, dan regulasi pemerintah. Penelitian ini berbeda dari apa yang diteliti oleh peneliti, yang mana peneliti membahas identitas agama. Kemudian, dari sisi kerangka pemikiran pun berbeda, penelitian ini menggunakan teori hubungan patron-klien (etnik), sedangkan peneliti menggunakan teori instrumentalisme.

¹⁵ Irfan Zharfandy, (2016), *Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Min Hajul Abidin dengan judul “*Politik Identitas Santri*”.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan bahwa pembentukan politik identitas pada santri terjadi karena adanya kekecewaan dan diskriminasi. Penelitian ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membahas tentang isu identitas agama dalam mempengaruhi sikap politik masyarakat.

Selanjutnya yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Endang Sari dengan judul “*Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*”.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan bahwa fenomena kebangkitan politik identitas agama di pemilihan gubernur Jakarta karena Ahok yang salah mengartikan Al-Maidah 51. Penelitian ini hampir sama pembahasannya dengan peneliti, yang membedakan adalah Endang Sari membahas tentang pilkada sedangkan peneliti adalah pemilihan presiden. Kemudian, teori yang Endang Sari gunakan disini yaitu konstruktivisme dan metode penelitiannya menggunakan Fenomenologi dengan pendekatan Kualitatif. Sedangkan, peneliti menggunakan teori Instrumentalisme, dan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

¹⁶ Min Hajul Abidin, (2017), *Politik Identitas Santri*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Sunan Kalijaga.

¹⁷ Endang Sari, (2016), *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*, Vol. 2, No. 2, Makasar: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Kemudian keempat, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Khiyarah dengan judul “*Genealogi dan Politik Identitas (Studi Terhadap Konflik Mahasiswa Palopo Dan Bonedi Universitas Muslim Indonesia)*”.¹⁸ Penelitian ini membahas bahwa politik identitas pada mahasiswa menimbulkan konflik berkepanjangan. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni identitas agama dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan.

Selanjutnya yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Tanti Purwanti dengan judul, “*Heterogenitas Etnik Dalam Pilkada Luwu Timur Tahun 2015*”.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan etnisitas terhadap pilihan politik masyarakat karena isu etnisitas pada pilkada Luwu Timur tahun 2015 cenderung tidak berpengaruh, ini berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, yakni isu identitas agamalah yang menjadi fokus permasalahan.

F. Kerangka Pemikiran

Identitas adalah hal yang penting dari individu-individu. Penyematan individu pada identitas tertentu adalah sebuah proyek yang selalu berada dalam proses konstruksi. Aspek krusial dari proyek subjektivitas adalah identitas, dimana identitas terhubung dengan masalah

¹⁸ Miftahul Khiyarah, (2017), *Genealogi Dan Politik Identitas (Studi Terhadap Konflik Mahasiswa Palopo Dan Bonedi Universitas Muslim Indonesia)*, Makasar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin.

¹⁹ Tanti Purwanti, (2016), *Heterogenitas Etnik Dalam Pilkada Luwu Timur Tahun 2015*, Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

interrelasi pengakuan diri (*self-recognition*) dan pengakuan diri lainnya. Melalui identitas manusia bisa dikenal dan diakui keberadannya. Identitas adalah sumber pemaknaan dan pengalaman individu-individu. Identitas terbentuk dari simbol atau kode-kode sosial yang disematkan kepada berbagai entitas seperti individu, kelompok atau organisasi tertentu. Untuk itu, identitas itu sendiri digunakan sebagai sarana yang menghubungkan, menandai dan mengenali keberadaan dari sebuah entitas. Bagi Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, identitas merupakan unsur kunci dari kenyataan subyektif yang terhubung secara dialektis dengan masyarakat.²⁰

Perbincangan identitas dalam ragam berpikir yang lebih kompleks, digagasi oleh Bikhu Parekh, yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang identitas bisa diidentifikasi ke dalam tiga dimensi: pertama adalah dimensi personal, yang merupakan identitas personal sebagai individu yang unik, yang memiliki tubuh yang berbeda, kesadaran dan subjektivitas. Kedua adalah dimensi sosial, yang merupakan identitas sosial sebagai anggota dari kelompok tertentu yang terhubung dengan kelompok lainnya dalam relasi yang formal maupun informal. Adanya perasaan memiliki (*sense of belonging*), perasaan bersama (*sense of common*), kesamaan identitas (*sense of identity*) menjadi karakteristik tertentu dari suatu kelompok identitas yang mendorong adanya persatuan, solidaritas, dan ikatan sosial-kultural lainnya antara para anggotanya. Ketiga adalah dimensi

²⁰ Laode Machdani Afala, (2018), *Politik Identitas di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, h. 9-10.

kemanusiaan sebagai identitas anggota dari komunitas manusia secara keseluruhan, yang bisa membedakannya dengan makhluk lainnya diluar spesies manusia. Dimensi ini memposisikan identitas lebih luas, melampaui pembentukan identitas personal dan sosial.²¹

Selanjutnya, istilah politik identitas dalam perkembangannya didefinisikan dalam beragam pengertian yang berbeda, istilah ini sering dipertukarkan dalam dua terminologi, yaitu *identity politics* atau *politics of identity*. Keduanya merujuk kepada berbagai bentuk mobilisasi politik atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya sering disembunyikan (*hidden*), ditekan (*suppressed*), atau diabaikan (*neglected*), baik oleh kelompok dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan yang diusung untuk dan atas nama demokrasi yang lebih progresif. Beberapa istilah penyebutan yang memiliki spirit perjuangan yang sama dengan politik identitas adalah politik perbedaan (*politics of difference*), politik pengakuan (*politics of recognition*), dan politik multikulturalisme (*politics of multiculturalism*).²²

Perbedaan antara identitas politik (*identity politics*) dengan politik identitas (*politics of identity*) yakni, identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek didalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada

²¹ Ibid, h. 11.

²² Ibid, h. 13

mekanisme politik pengorganisasian identitas sebagai sumberdaya dan sarana politik.²³

Politik identitas dapat dimaknai sebagai tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, yang berdasar ras, etnisitas, gender, atau keagamaan.²⁴ Artinya, identitas digunakan sebagai alat dan dipolitisasi sehingga dapat merealisasikan kepentingan-kepentingan individu, kelompok maupun elite politik.

Dalam tulisan Stanley Aronowitz tentang “ *The politics of identity: Class, Culture and Social Movements*” secara implisit kita bisa membagi kemunculan politik identitas dalam dua kategori, yaitu; pertama, politik identitas lama (*old politics of identity*) yang isu-isunya fokus pada nilai lama modernitas-industrialisme dalam sistem kapitalis pasar dengan sebuah negara liberal yang menggaransikan demokrasi parlementariat dan hak-hak individu dimana identitas diarahkan untuk tujuan politis melalui kepentingan dan posisi ekonomi. Kedua, politik identitas baru (*new politics of identity*), yang fokusnya pada politik baru yang terkait dengan identitas-identitas ras, gender, maupun agama. Pada dasarnya, perbedaan tersebut tampak pada isu-isu yang menggerakkan gerakan sosial politik dalam perkembangan sejarah.²⁵ Seperti pada pemilihan presiden 2019 yang lalu, dimana identitas agama digunakan pada saat itu.

²³ Andy Prima Sahalatua, Op.Cit., h. 19.

²⁴ Ibid.

²⁵ Laode Machdani Afala, Op.Cit., h. 14-15.

Beberapa ilmuwan juga mencoba mendefinisikan politik identitas diantaranya adalah Stuart Hall. Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari *sense* (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas. Dari pernyataan tersebut, maka, ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan perbedaan (*otherness*) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of difference*). Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain maupun kelompok satu dengan yang lain.²⁶

Identitas itu sendiri adalah hal yang melekat pada setiap individu dan komunitas. Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain dan pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Identitas dalam sosiologi dikategorikan menjadi beberapa kategori, yakni; kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas. Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya.²⁷

²⁶ Andy Prima Sahalatua, Op.Cit., h. 20.

²⁷ Ibid.,

Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu;²⁸ Primordialisme, identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun. Konstruktivisme, identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. Instrumentalisme, identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elite dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan.

Primordialisme dan instrumentalise memang saling berkaitan satu sama lain, tapi hal ini berbeda ketika identitas yang di bawa oleh seseorang dari lahir ataupun turun temurun digunakan atau dijadikan sebagai sarana oleh elite politik untuk mendapatkan kekuasaan. Misalkan pada pilpres 2019 lalu, ketika Ma'ruf Amin yang beragama islam sejak lahir ditunjuk mendampingi paslon 01 sebagai cawapres, hal ini digunakan sebagai bentuk untuk mendapatkan suara terutama suara pemilih muslim, beliau yang dikenal sebagai ulama besar dan pada saat itupun menjabat sebagai ketua MUI, dipergunakan oleh elite untuk mencari simpati masyarakat terutama pemilih muslim guna mendapatkan kekuasaan.

Maka pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Instrumentalisme dari Stuart Hall. Konsep ini sangat cocok dengan realita yang terjadi pada pemilihan presiden 2019. Intrumentalisme sendiri menjelaskan tentang identitas senantiasa dijadikan sebagai sarana elite dan

²⁸ Titik Widayanti, (2009), *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*, Yogyakarta: Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, h. 14-15.

memanipulasi identitas tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Donal Horowitz juga memberikan penjelasan etnisitas (agama) memang dapat dimanipulasi (*instrumentalisme*), namun juga secara luas etnisitas dalam hal ini agama diterima secara bawaan (*primordial*).²⁹

Pendekatan instrumentalis banyak mendapatkan kritik karena dianggap terlalu materialis dan tidak memperhitungkan hubungan positif keterkaitan primordial dari seseorang terhadap identitasnya. Namun, berbagai bukti empiris bahwa identitas primordial seringkali digunakan sebagai instrumen politik adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena hal ini terjadi dalam berbagai arena dan situasi politik.³⁰

Konsep ini sejalan dengan realita pada pemilihan presiden tahun 2019, yang mana isu identitas agama dijadikan sarana kemudian dimanipulasi sedemikian rupa oleh elite politik untuk kepentingan kekuasaan, sehingga masyarakat pada saat itu terpengaruh akan hal tersebut. Hal inilah yang menjadikan salah satu indikator masyarakat menentukan sikap politiknya pada saat pemilihan presiden 2019.

Sikap politik berbicara tentang kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai penghayatan terhadap obyek yang bersangkutan.³¹ Sikap politik tergantung dari persoalan-persoalan para pemimpin, gagasan-gagasan, lembaga-lembaga dan peristiwa-peristiwa politik. Walaupun sikap lebih abadi dari pikiran atau suasana hati

²⁹ Endang Sari, Op.Cit., h. 151.

³⁰ Ibid.,

³¹ Sudijono Sastroatmodjo, (1995), *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, h. 4.

yang fana, namun sikap cenderung berubah sesuai berlakunya waktu dan dengan berubahnya keadaan dan cenderung dipengaruhi oleh berbagai macam motif (karena sikap itu sifatnya insidental) tergantung dari kondisi atau peristiwa yang mendukung dan melatarbelakanginya.³²

Ada tiga komponen yang mempengaruhi sikap politik individu masyarakat terhadap suatu objek politik.³³ Pertama komponen kognitive, adalah komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Artinya mereka yang mengetahui sedikit banyaknya proses menjelang pemilihan presiden tahun 2019 beberapa waktu yang lalu mulai dari, kandidat, partai pengusungnya, isu-isu yang beredar dan lain-lain.

Kemudian komponen afektif, komponen afektif membahas tentang perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya. Artinya, komponen ini menjelaskan perasaan masyarakat Kota Palembang melihat bagaimana proses politik jelang pemilihan presiden tahun 2019 waktu lalu khususnya melihat isu identitas agama pada saat itu serta bagaimana perasaan masyarakat Kota Palembang sebagai pemilih pada pilpres 2019 yang lalu.

Ketiga yakni komponen evaluatif, menjelaskan bahwa bagaimana mereka dan berpendapat memutuskan tentang objek-objek politik yang mereka lihat tersebut. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat Kota

³² Lintang Yunita Afriana, (2016), *Sikap Politik Anak Punk Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015*, Bandar Lampung: FISIP Universitas Lampung, h. 25.

³³ Gabriel Almond dan Sidney Verba, (1990), *Budaya Politik*, Jakarta: Bina Aksara, h. 16.

Palembang berpendapat seperti apa proses politik pada pemilihan presiden 2019 yang lalu kemudian memutuskan pilihan mereka.

Ketiga komponen inilah yang menjadi proses pembentukan sikap politik suatu individu. Bagaimana sikap politik masyarakat melihat objek politik yakni isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019 kemudian mengetahui, mempercayai dan merasakan hal itu. Selanjutnya mereka mengambil bagian dalam proses tersebut, proses ini dinamakan dengan istilah partisipasi politik.

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis.³⁴ Pertama yakni partisipasi politik ‘apatis’, adalah orang yang menarik diri dari proses politik. Dalam hal ini, masyarakat yang tidak peduli dan menarik diri dari proses pemilihan presiden 2019 beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya yang kedua yakni partisipasi politik ‘spectator’. Partisipasi politik spectator adalah orang yang sedikit-banyaknya mengetahui dan ikut dalam pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu. Artinya, dalam partisipasi spectator pemilih cenderung dapat dipengaruhi dalam menentukan pilihannya. Ketiga adalah partisipasi politik ‘gladiator’, adalah orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik. Artinya mereka yang secara aktif mengikut proses politik pada pemilihan presiden 2019 yang lalu mulai dari pengetahuan mereka terhadap perkembangan apa saja pada pemilihan presiden 2019 yang lalu termasuk

³⁴ L. Milbrath dan M. Goel, *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics*, ed. ke-2, Chicago, III: Rind McMally 1977.

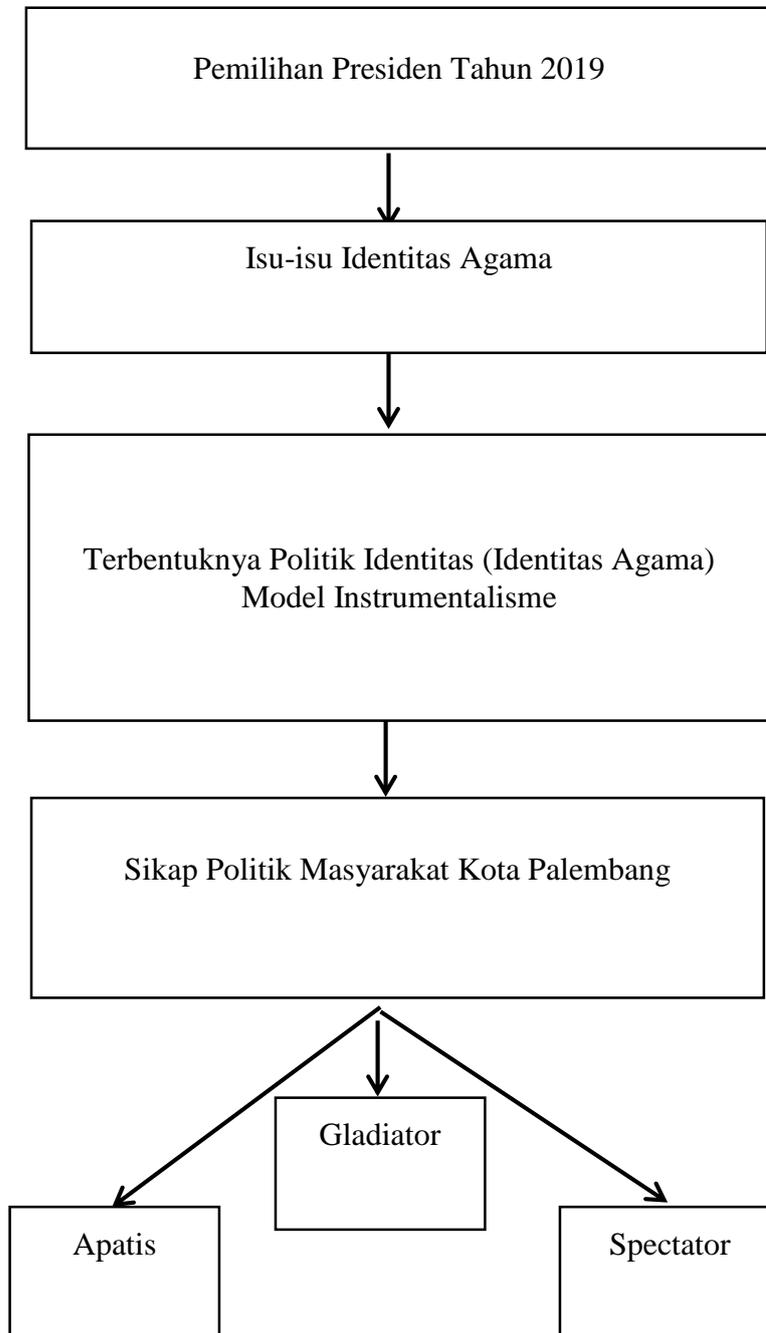
isu identitas agama, maupun mereka yang terlibat langsung dalam mengkampanyekan salah satu pasangan calon pada saat itu.

Sikap politik dan partisipasi politik hampir sama konsepnya, akan tetapi hasilnya yang membedakan. Partisipasi politik melihat bagaimana masyarakat ikut berperan atas suatu objek politik dalam hal ini melihat isu identitas agama pada pilpres 2019, sedangkan sikap politik juga melihat seperti apa pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam melihat isu identitas agama, tetapi hasilnya nanti akan mempengaruhi atau tidaknya pandangan mereka terhadap suatu objek dan memutuskan pilihan masyarakat tersebut pada pemilihan presiden tahun 2019.

Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi politik adalah seperti apa keterlibatan dan pengetahuan individu pada suatu objek politik dalam hal ini isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu, kemudian pengetahuan dan keterlibatan ini menggambarkan sikap politik individu tersebut, dalam hal ini adalah masyarakat Kota Palembang.

Dari paparan diatas dapat digambarkan suatu bagan guna mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan atau Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti, kemudian disusun menjadi sebuah narasi.³⁵ Peneliti menggunakan metode ini agar dapat menjelaskan dan menjabarkan analisis instrumental atas terbentuknya isu identitas agama dan sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden tahun 2019.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.³⁶ Data primer dari penelitian ini bersumber dari 26 masyarakat Kota Palembang yang terdiri dari, tokoh Muhammadiyah Kota Palembang, tokoh NU Kota Palembang, dan masyarakat Kota Palembang.

Kemudian data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada.³⁷ Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari literatur buku, jurnal, skripsi, artikel,

³⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, (2005), *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Edisi Ketiga), Jakarta: Prenadamedia Group, h. 166.

³⁶ *Ibid*, h. 55.

³⁷ *Ibid*,.

internet dan sebagainya yang berkaitan dengan isu identitas agama dan sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi. Teknik observasi adalah pengamatan atau peninjauan di dalam sebuah penelitian dalam mencari dan mendapatkan data untuk mendukung adanya suatu kajian yang diteliti.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengamati perkembangan pemilihan presiden tahun 2019 terutama isu identitas agama pada saat itu.

Selain metode observasi, peneliti juga menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan responden atau informan (orang yang akan diwawancarai), jawaban responden akan menjadi data mentah.³⁹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa informan, yakni sebagai berikut:

³⁸ Ellsa Rizki Nofrianti, (2019), *Strategi Presentasi Diri Melalui Pencantuman Nama Keluarga Dalam Iklan Kampanye Caleg di Kota Palembang Tahun 2019*, Palembang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, h. 22

³⁹ Lisa Harrison, 2007, *Metodologi Penelitian Politik (Edisi Pertama)*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, h. 104.

Tabel 1.2 Informan yang telah diwawancarai.

| NO | NAMA INFOR MAN | USIA | DOMISILI | PEKERJAAN | KETERANGAN |
|-----------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--|---|
| 1 | IW | 51 | Kec. Alang- alang Lebar. | Dosen dan Pengurus Majelis Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palembang | Tokoh Muhammadiyah Kota Palembang |
| 2 | IS | 55 | Kec. Alang- alang Lebar | Aparatur Sipil Negara (Pengawas) | Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Palembang |
| 3 | AM | 23 | Kec. Sako | Mahasiswa | Masy. Kota Palembang |
| 4 | AZ | 60 | Ilir Barat II | Wiraswasta | Masy. Kota Palembang |
| 5 | AO | 22 | IT I | Pegawai Swasta | Masy. Kota Palembang |
| 6 | BM | 19 | IT II | - | Masy. Kota Palembang |
| 7 | DA | 51 | Pahlawan, Kec. Kemuning | Pedagang | Masy. Kota Palembang |
| 8 | FF | 30 | Kec. Kalidoni | Pegawai Honorar | Masy. Kota Palembang |
| 9 | FM | 19 | Ilir Barat II | Mahasiswa | Masy. Kota Palembang |
| 10 | MA | 22 | Seberang Ulu II | Mahasiswa | Masy. Kota Palembang |
| 11 | MA | 46 | IT I | Pedagang | Masy. Kota Palembang |

| | | | | | |
|----|----|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 12 | MD | 18 | Plaju | - | Masy. Kota Palembang |
| 13 | MF | 19 | Kec. Sukarami | Mahasiswa | Masy. Kota Palembang |
| 14 | MR | 18 | Seberang Ulu I | - | Masy. Kota Palembang |
| 15 | MR | 22 | 7 Ulu, Seberang Ulu I | Mahasiswa | Masy. Kota Palembang |
| 16 | MR | 26 | Palimo, Kemuning. | Pegawai Swasta | Masy. Kota Palembang |
| 17 | PA | 30 | 35 Ilir, Kec. Gandus | Pegawai Honorer | Masy. Kota Palembang |
| 18 | PR | 23 | Bukit Kecil | Pedagang | Masy. Kota Palembang |
| 19 | RK | 25 | Ilir Barat 1 | Wartawan Media Online | Masy. Kota Palembang |
| 20 | RI | 24 | Sematang Borang | Supir Karyawan | Masy. Kota Palembang |
| 21 | SA | 46 | Ilir Timur I | Pedagang | Masy. Kota Palembang |
| 22 | ST | 23 | Plaju | - | Masy. Kota Palembang |
| 23 | SR | 18 | Ilir Timur II | - | Masy. Kota Palembang |
| 24 | SM | 43 | Kec. Kemuning | Pedagang | Masy. Kota Palembang |
| 25 | SU | 66 | Kec. Sematang Borang | Pedagang | Masy. Kota Palembang |
| 26 | YR | 24 | Kec. Ilir Timur 3 | Pegawai | Masy. Kota Palembang |

Sumber: Diolah peneliti dari hasil wawancara.

Selanjutnya dokumentasi, secara sederhana dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari suatu kegiatan yang menyangkut dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, file, foto, video, atau rekaman suara sebagai bahan komunikasi langsung. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan segala dokumen yang berhubungan dengan isu identitas agama dan sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden 2019, terutama dari internet, buku, artikel, jurnal dan skripsi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari penelitian ini adalah di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena Palembang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk 1.643.488 jiwa,⁴⁰ dan peneliti juga ingin mengetahui sikap politik masyarakat Kota Palembang terhadap isu identitas agama pada pemilihan presiden 2019.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini, antara lain menggunakan empat tahapan yakni.⁴¹

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dari beberapa informan yaitu meliputi tokoh

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kota Palembang, (2019), *Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2015-2018*, <https://palembangkota.bps.go.id>, diakses pada 5 November 2019.

⁴¹ Ellsa Rizki Nofrianti, Op.Cit., h. 24.

Muhammadiyah Kota Palembang, tokoh NU Kota Palembang, dan masyarakat Kota Palembang. Kemudian data tersebut dicatat dan dikumpulkan. Data tersebut berisi tentang hasil tanya jawab dengan informan yang ditulis secara lengkap.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada, yakni yang berkaitan dengan isu identitas agama dan sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden tahun 2019.

c. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan isu identitas agama dan sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden tahun 2019.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi atau telah disajikan. Pada tahap ini peneliti bertugas untuk menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini peneliti memperjelas dan mempertegas data yang telah disajikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam empat bab, yaitu:

BAB I, dalam bab ini diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian yang meliputi gambaran umum Kota Palembang dan Pemilihan Presiden Tahun 2019.

BAB III, pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari perumusan masalah yakni mengenai analisis instrumentalis atas terbentuknya isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019 dan sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden tahun 2019.

BAB IV, bab ini merupakan bagian penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Lokasi penelitian dari judul isu identitas agama dan sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden tahun 2019 adalah di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Secara geografis, Kota Palembang terletak di $2^{\circ} 52''$ sampai $3^{\circ} 5''$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 37''$ sampai $104^{\circ} 52''$ Bujur Timur, dengan dibatasi oleh empat wilayah yakni, sebelah Utara, Timur dan Barat dibatasi Kabupaten Banyuasin, sedangkan sebelah Selatan dibatasi Kabupaten Muara Enim serta Ogan Ilir. Luas wilayah Kota Palembang adalah $400,61 \text{ km}^2$, terdiri dari 16 kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Gandus dengan $68,78 \text{ km}^2$, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Ilir Barat II $6,22 \text{ km}^2$.⁴²

Berikut adalah luas wilayah berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Palembang:

⁴² Badan Pusat Statistik Kota Palembang (2017), *Letak Geografis dan Batas Wilayah Kota Palembang*, <https://palembangkota.bps.go.id>, diakses pada 5 November 2019.

Tabel 2.1 Luas Wilayah
Berdasarkan Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2016.

| NO | Kecamatan | Luas Wilayah(Km ²) | Persentase |
|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | Iilir Barat II | 6,22 | 1,55 |
| 2 | Gandus | 68,78 | 17,17 |
| 3 | Seberang Ulu I | 17,44 | 4,35 |
| 4 | Kertapati | 42,56 | 10,62 |
| 5 | Seberang Ulu II | 10,69 | 2,67 |
| 6 | Plaju | 15,17 | 3,79 |
| 7 | Iilir Barat I | 19,77 | 4,93 |
| 8 | Bukit Kecil | 9,92 | 2,48 |
| 9 | Iilir Timur I | 6,50 | 1,62 |
| 10 | Kemuning | 9,00 | 2,25 |
| 11 | Iilir Timur II | 25,28 | 6,39 |
| 12 | Kalidoni | 27,92 | 6,97 |
| 13 | Sako | 18,04 | 4,50 |
| 14 | Sematang Borang | 36,98 | 9,23 |
| 15 | Sukarami | 51,46 | 12,85 |
| 16 | Alang-alang Lebar | 34,58 | 8,63 |
| Palembang | | 400,61 | 100.00 |

Sumber: diolah dari <https://palembangkota.bps.go.id>

2. Jumlah Penduduk

Kota Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan kota terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kota Palembang sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan maupun diluar Sumatera Selatan. Jumlah penduduk Kota Palembang dari tahun ke tahun pun

mengalami peningkatan, terbukti pada tahun 2015 jumlah penduduk kota Palembang yakni sebanyak kurang lebih 1.580.517 jiwa dan pada saat tahun 2018 jumlah penduduk Kota Palembang menjadi 1.643.488 jiwa.⁴³

Jumlah penduduk Kota Palembang berdasarkan Kecamatan dan laju pertumbuhan selama periode tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Palembang

| NO | Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Palembang periode 2015-2018 | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|
| | Kecamatan | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| 1 | Ilir Barat II | 65.991 | 66.891 | 71.267 | 72.387 |
| 2 | Gandus | 62.146 | 62.994 | 64.020 | 64.993 |
| 3 | Seberang Ulu I | 176.749 | 179.160 | 91.619 | 93.012 |
| 4 | Kertapati | 84.698 | 85.853 | 89.597 | 90.977 |
| 5 | Jakabaring | - | - | 90.791 | 92.172 |
| 6 | Seberang Ulu II | 99.222 | 100.575 | 104.209 | 105.815 |
| 7 | Plaju | 81.891 | 83.008 | 88.265 | 89.644 |
| 8 | Ilir Barat I | 135.385 | 137.231 | 137.863 | 139.933 |
| 9 | Bukit Kecil | 43.967 | 44.567 | 48.874 | 49.657 |
| 10 | Ilir Timur I | 71.418 | 72.391 | 77.102 | 78.316 |
| 11 | Kemuning | 85.002 | 86.161 | 91.419 | 92.847 |
| 12 | Ilir Timur II | 165.238 | 167.491 | 93.352 | 94.810 |
| 13 | Kalidoni | 110.982 | 112.495 | 111.030 | 111.691 |
| 14 | Ilir Timur III | - | - | 83.640 | 84.937 |

⁴³ Badan Pusat Statistik Kota Palembang, (2019), *Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2015-2018*, <https://palembangkota.bps.go.id>, diakses pada 5 November 2019.

| | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | Sako | 91.087 | 92.329 | 91.753 | 92.301 |
| 16 | Sematang Borang | 37.434 | 37.945 | 35.821 | 36.032 |
| 17 | Sukarami | 164.139 | 166.378 | 155.590 | 156.509 |
| 18 | Alang-alang Lebar | 105.168 | 106.602 | 96.886 | 97.455 |
| Jumlah | | 1.580.517 | 1.602.071 | 1.623.099 | 1.643.488 |

Sumber: <https://palembangkota.bps.go.id>

Ket:*) Kecamatan baru, terbentuk pada tahun 2017 setelah pemekaran yakni Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur III

3. Agama

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, salah satu silanya yakni sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negaranya diharuskan memeluk agama yang diyakini dan meyakini tiap ajaran-ajaran agama tersebut.

Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang berbeda-beda, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari beberapa agama tersebut, agama Islamlah yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, hal inilah yang digunakan oleh para elite politik di negeri ini, ketika agama terutama Islam digunakan sebagai alat untuk kekuasaan. Terbukti pada pemilihan presiden 2019 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, penggunaan isu identitas agama sangat sering sekali disebut-sebut di berbagai daerah di Indonesia tidak terkecuali di Kota Palembang.

Berikut ini adalah jumlah penduduk Kota Palembang yang menganut agama Islam pada tahun 2014:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk

Beragama Islam di Kota Palembang Tahun 2014

| NO | Kecamatan | Jumlah Penduduk Beragama Islam di Kota Palembang Tahun 2014 |
|---------------|-------------------|--|
| 1 | Ilir Barat II | 69.722 |
| 2 | Gandus | 67.304 |
| 3 | Seberang Ulu I | 184.811 |
| 4 | Kertapati | 98.316 |
| 5 | Seberang Ulu II | 100.631 |
| 6 | Plaju | 94.103 |
| 7 | Ilir Barat I | 137.109 |
| 8 | Bukit Kecil | 46.676 |
| 9 | Ilir Timur I | 60.381 |
| 10 | Kemuning | 84.767 |
| 11 | Ilir Timur II | 170.086 |
| 12 | Kalidoni | 114.790 |
| 13 | Sako | 86.291 |
| 14 | Sematang Borang | 36.104 |
| 15 | Sukarami | 145.383 |
| 16 | Alang-alang Lebar | 88.702 |
| Jumlah | | 158.5176 |

Sumber: <https://palembangkota.bps.go.id>

4. Kelompok Usia

Usia adalah salah satu syarat setiap orang di Indonesia untuk menentukan pilihannya, baik pemilihan legislatif, kepala daerah maupun pemilihan presiden tahun 2019. Usia yang dibutuhkan untuk memilih yakni 17 tahun atau lebih. Berikut kelompok usia masyarakat Kota Palembang tahun 2018:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Palembang Tahun 2018

| Kelompok Umur | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| | 2018 | 2018 | 2018 |
| 15-19 | 74.430 | 75.634 | 150.064 |
| 20-24 | 76.151 | 74.688 | 150.839 |
| 25-29 | 71.340 | 68.655 | 139.995 |
| 30-34 | 67.730 | 65.496 | 133.226 |
| 35-39 | 63.084 | 64.841 | 127.925 |
| 40-44 | 59.527 | 60.241 | 119.768 |
| 45-49 | 51.690 | 53.163 | 104.853 |
| 50-54 | 45.555 | 47.307 | 92.862 |
| 55-59 | 38.652 | 38.935 | 77.587 |
| 60-64 | 25.431 | 25.228 | 50.659 |
| 65-69 | 16.034 | 16.722 | 32.756 |
| 70-74 | 8.836 | 11.111 | 19.947 |
| 75+ | 7.281 | 11.963 | 19.244 |
| Jumlah | 824.086 | 819.402 | 1.643.488 |

Sumber: <https://palembangkota.bps.go.id>

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting untuk mengukur maju atau tidaknya suatu wilayah, serta dalam mendukung proses pembangunan suatu wilayah tersebut. Pendidikan yang berkualitas pasti akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pula, baik dalam memahami segala sesuatu ataupun fenomena yang ada pada saat ini, termasuk isu identitas agama yang berkembang pada saat pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Untuk Kota Palembang, fasilitas penunjang untuk merealisasikan sumber daya yang berkualitas sudah cukup memadai.

Hal ini dibuktikan dengan melihat sarana pendidikan yang terdapat di Kota Palembang. Tahun 2014, Kota Palembang memiliki sekolah sebanyak 762 sekolah yang terdiri atas 374 Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta (SD), 197 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta (SMP), 119 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta, serta 72 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri maupun Swasta.⁴⁴

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kota Palembang, (2015), *Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2014*, <https://palembangkota.bps.go.id>, diakses pada 5 November 2019

6. Kemiskinan

Kemisikinan menjadi permasalahan utama di Indonesia, sudah banyak sekali kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi hal itu guna mensejahterahkan masyarakat. Kemiskinan juga menjadi faktor penghambat beberapa wilayah di Indonesia dalam memajukan pendidikannya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemiskinan terjadi di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, khususnya Kota Palembang.

Tahun 2018, penduduk miskin di Kota Palembang yakni sebanyak 179.32 orang atau 10,95 persen. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017. Saat itu, penduduk miskin berjumlah 184.41 orang atau 11,40 persen. Hal ini adalah salah satu keberhasilan pemerintah Kota Palembang dalam mengurangi angka kemiskinan, walaupun hal ini belum terjadi secara signifikan.⁴⁵

B. Pemilihan Presiden Tahun 2019

Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Masing-masing kedua calon presiden dan wakil presiden diusung oleh beberapa partai politik. Mulai dari pasangan nomor urut satu yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang didukung oleh beberapa partai politik dan berkoalisi, mereka menamakan koalisi ini

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kota Palembang, (2019), *Jumlah Penduduk Miskin di Kota Palembang Tahun 2012-2018*, <https://palembangkota.bps.go.id>, diakses pada 5 November 2019.

dengan sebutan ‘Koalisi Indonesia Maju’. Kemudian dari pasangan calon nomor urut dua yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang didukung oleh beberapa partai politik dan berkoalisi, mereka menamakan koalisi ini dengan sebutan ‘Indonesia Adil Makmur’.

Pasangan nomor urut satu diusung oleh beberapa partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Sementara, pasangan nomor urut dua, diusung oleh beberapa partai yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya.

Pemilihan presiden tahun 2019 telah berakhir, pasangan nomor urut satu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin unggul atas pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pilpres tingkat nasional 34 provinsi dan pemilihan luar negeri. Dari jumlah suara sah sebanyak 154,26 juta, pasangan capres/cawapres Jokowi-Ma’ruf berhasil meraih 85,6 juta

(55,5%) suara. Sedangkan lawannya, Prabowo-Sandi hanya meraup 68,65 juta (44,5%) suara.⁴⁶

Jawa Tengah merupakan lumbung suara bagi calon presiden nomor urut satu dengan meraih 16,83 juta suara, unggul 11,88 juta suara dari Prabowo yang hanya mendapat 4,94 juta suara. Demikian pula di Jawa Timur, Jokowi mampu meraup 16,23 juta suara, mengalahkan lawannya dengan selisih 7,79 juta suara. Sedangkan calon presiden nomor urut dua meraih suara terbesar di Jawa Barat, yakni mencapai 16,07 juta, unggul dari Jokowi dengan selisih 5,33 juta suara. Pasangan nomor urut satu unggul di 21 provinsi ditambah pemilihan luar negeri sedangkan nomor urut dua menang di 13 provinsi.⁴⁷ Berikut tabel rekapitulasi pilpres 2019:

⁴⁶ Komisi Pemilihan Umum (KPU), (2019), *Rekapitulasi Pilpres 2019 Nasional*, <https://pemilu2019.kpu.go.id>, diakses pada 7 November 2019.

⁴⁷ Ibid.,

Tabel 2.5 Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019.

| NO | Wilayah | (01) Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin | (02) H. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno |
|-----------|----------------------------|--|--|
| 1 | Aceh | 404.188 | 2.400.746 |
| 2 | Sumatera Utara | 3.936.515 | 3.587.786 |
| 3 | Sumatera Barat | 407.761 | 2.488.733 |
| 4 | Riau | 1.248.713 | 1.975.287 |
| 5 | Jambi | 859.833 | 1.203.025 |
| 6 | Sumatera Selatan | 1.942.987 | 2.877.781 |
| 7 | Bengkulu | 583.488 | 585.999 |
| 8 | Lampung | 2.853.585 | 1.955.689 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 495.729 | 288.235 |
| 10 | Kepulauan Riau | 550.692 | 465.511 |
| 11 | DKI Jakarta | 3.279.547 | 3.066.137 |
| 12 | Jawa Barat | 10.750.568 | 16.077.446 |
| 13 | Jawa Tengah | 16.825.511 | 4.944.447 |
| 14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1.655.174 | 742.481 |
| 15 | Jawa Timur | 16.231.668 | 8.441.247 |
| 16 | Banten | 2.537.524 | 4.059.514 |
| 17 | Bali | 2.351.057 | 213.415 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 951.242 | 2.011.319 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 2.368.982 | 305.587 |
| 20 | Kalimantan Barat | 1.709.896 | 1.263.757 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 830.948 | 537.138 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 823.939 | 1.470.163 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.094.845 | 870.443 |
| 24 | Sulawesi Utara | 1.220.524 | 359.685 |

| | | | |
|----|-------------------|-----------|-----------|
| 25 | Sulawesi Tengah | 914.588 | 706.654 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 2.117.591 | 2.809.393 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 555.664 | 842.117 |
| 28 | Gorontalo | 369.803 | 345.129 |
| 29 | Sulawesi Barat | 475.312 | 263.620 |
| 30 | Maluku | 599.457 | 392.940 |
| 31 | Maluku Utara | 310.548 | 344.823 |
| 32 | Papua | 3.021.713 | 311.352 |
| 33 | Papua Barat | 508.997 | 128.732 |
| 34 | Kalimantan Utara | 248.239 | 106.162 |
| 35 | +Luar Negeri | 570.534 | 207.746 |

Sumber: <https://pemilu2019.kpu.go.id>

Untuk hasil rekapitulasi pemilihan presiden 2019 di Kota Palembang dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua, unggul di 17 Kecamatan. Sedangkan, pasangan nomor urut satu hanya unggul di Kecamatan IT 1 saja. Pasangan calon nomor urut satu meraih 350.519 suara dan pasangan calon nomor urut dua meraih 561.079 suara.⁴⁸ Jumlah suara sah sebanyak 909,961 dan suara yang tidak sebanyak 15.584.⁴⁹

Berikut ini adalah tabel hasil rekapitulasi pemilihan presiden tahun 2019 di Kota Palembang:

⁴⁸ Komisi Pemilihan Umum (KPU), (2019), *Rekapitulasi Pilpres 2019 Wilayah Pemilihan Kota Palembang*, <https://pemilu2019.kpu.go.id>, diakses pada 10 November 2019.

⁴⁹ Raja Adil Siregar, (2019), *Rekapitulasi KPU di Palembang: Jokowi-Ma'ruf 38,52% Prabowo-Sandi 61,48%*, <https://news.detik.com/>, diakses pada 29 Oktober 2019.

Tabel 2.6 Hasil Rekapitulasi Pilpres 2019 Wilayah Kota Palembang.

| NO | Wilayah | (01) Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin | (02) H. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno |
|---------------|-----------------|--|--|
| 1 | Alang-alang | 19.211 | 34.183 |
| 2 | Bukit Kecil | 8.267 | 15.128 |
| 3 | Gandus | 13.462 | 25.284 |
| 4 | Iilir Barat I | 27.850 | 52.017 |
| 5 | Iilir Barat II | 14.296 | 24.857 |
| 6 | Iilir Timur I | 22.036 | 18.045 |
| 7 | Iilir Timur II | 15.596 | 27.983 |
| 8 | Iilir Timur III | 17.692 | 27.983 |
| 9 | Jakabaring | 19.025 | 29.123 |
| 10 | Kalidoni | 24.070 | 42.085 |
| 11 | Kemuning | 18.434 | 28.508 |
| 12 | Kertapati | 21.137 | 30.468 |
| 13 | Plaju | 21.028 | 32.912 |
| 14 | Sako | 21.559 | 34.531 |
| 15 | Seberang Ulu I | 18.538 | 31.203 |
| 16 | Seberang Ulu II | 20.061 | 35.074 |
| 17 | Sematang Borang | 10.938 | 16.473 |
| 18 | Sukarami | 37.319 | 55.222 |
| JUMLAH | | 350.519 | 561.079 |

Sumber: <https://pemilu2019.kpu.go.id>

Selanjutnya, untuk Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Palembang yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.7 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Palembang**

| No. | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Ilir Barat II | 23.449 | 23.693 | 47.142 |
| 2. | Gandus | 23.291 | 22.499 | 45.790 |
| 3. | Seberang Ulu I | 31.160 | 30.568 | 61.728 |
| 4. | Jakabaring | 29.178 | 29.713 | 58.891 |
| 5. | Kertapati | 31.455 | 31.249 | 62.704 |
| 6. | Seberang Ulu II | 33.274 | 32.986 | 66.260 |
| 7. | Plaju | 33.329 | 33.767 | 67.096 |
| 8. | Ilir Barat I | 48.511 | 49.741 | 98.252 |
| 9. | Bukit Kecil | 16.525 | 17.891 | 34.416 |
| 10. | Ilir Timur I | 25.739 | 27.878 | 53.617 |
| 11. | Kemuning | 28.640 | 29.738 | 58.378 |
| 12. | Ilir Timur II | 31.246 | 32.559 | 63.805 |
| 13. | Ilir Timur III | 27.322 | 27.946 | 55.269 |
| 14. | Kalidoni | 39.810 | 40.366 | 80.176 |
| 15. | Sako | 32.377 | 33.188 | 65.565 |
| 16. | Sematang Borang | 17.800 | 17.492 | 35.292 |
| 17. | Sukarami | 54.659 | 56.855 | 111.514 |
| 18. | Alang-Alang Lebar | 29.496 | 30.697 | 60.193 |
| Jumlah | | 557.261 | 568.826 | 1.126.088 |

Sumber: Diolah dari Data KPU Kota Palembang Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat Kota Palembang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan presiden 2019 lalu mencapai 1.126.088 jiwa, terdiri dari 557.261 jiwa pemilih laki-laki dan 568.826 jiwa pemilih perempuan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan serta menjelaskan isu identitas agama dan sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden tahun 2019. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal tersebut, peneliti menggunakan kerangka pemikiran yang bersumber dari Stuart Hall serta Milbrath dan Goel. Landasan pemikiran tersebut kemudian diolah oleh peneliti untuk mempermudah dalam menganalisis dua permasalahan yang akan di jawab yaitu, bagaimana analisis instrumentalis atas terbentuknya isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019 dan bagaimana sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden tahun 2019.

A. Analisis Instrumentalis atas Terbentuknya Isu Identitas Agama pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Instrumentalis atau instrumentalisme adalah satu dari tiga teori identitas dari Stuart Hall, teori ini menjelaskan bahwa identitas senantiasa dijadikan sebagai sarana elite politik maupun oknum tertentu, kemudian memanipulasi identitas tersebut demi keuntungan mereka sendiri.⁵⁰ Achmad Munjid juga memberikan penjelasan mengenai hal ini, pada saat diskusi *Politics and Religion in Indonesia di Auditorium CSIS* di Jakarta, pada 5 Mei 2019 lalu,

⁵⁰ Endang Sari, (2016), *Kebangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*, Vol. 2, No. 2, Makasar: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, h. 151.

beliau mengatakan bahwa ketika politik dan agama bercampur, maka akan seperti minyak dan api, membuat kobaran api, daripada cahaya. Jadi sangat jelas sekali, politik identitas merupakan permasalahan yang sangat kuat di pilpres 2019 dan pilpres sebelum-sebelumnya. Politik identitas artinya eksploitasi eksklusif identitas seperti agama, etnis, ras, kelompok sosial lainnya untuk memobilisasi politik.⁵¹

Dari penjelasan tersebut, politik identitas adalah cara yang dipakai individu atau kelompok kemudian menggunakan secara langsung dan mengexploitasi suatu identitas tersebut dalam hal ini adalah agama untuk memobilisasi masa ataupun mencari suara sebanyak-banyaknya, hal inilah yang terjadi pada pemilihan presiden 2019, ketika isu identitas dieksploitasi dan digunakan masing-masing kubu maupun pendukung kedua paslon sebagai cara untuk memobilisasi masa ataupun mendapatkan simpati masyarakat untuk mencari suara sebanyak-banyaknya. Berdasarkan analisis peneliti dan juga didukung oleh data di lapangan, maka instrumentalisme atas terbentuknya isu identitas agama pada pemilihan presiden 2019 adalah sebagai berikut.

⁵¹ Ghita Intan, (2019), *Politisasi Agama Kental Warnai Pemilu 2019*, <https://www.voaindonesia.com>, diakses pada 10 Januari 2020.

Analisis Instrumentalis atas Terbentuknya Isu Identitas Agama pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Pembahasan tentang perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini sedang memanas terutama pada tahun 2019 yang lalu, dimana telah dilaksanakannya pemilu serentak pertama di negeri ini. Bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden, pemilu 2019 pun menjadi momen rakyat Indonesia memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mereka masing-masing. Akan tetapi, pemilihan presidenlah yang mendapatkan sorotan lebih banyak pada pemilu serentak 2019 lalu.

Hal ini dikarenakan pemilihan presiden 2019 jauh lebih kompleks dan rumit dari pemilihan presiden sebelum-sebelumnya, begitu banyaknya hal yang sangat menarik dan kontroversial menjelang pemilihan maupun pasca pemilihan presiden 2019 lalu. Tapi disini peneliti tidak akan terlalu membahas apa saja permasalahan yang ada pasca pemilihan presiden tahun 2019, peneliti akan lebih membahas hal-hal apa saja menjelang pemilihan presiden tahun 2019.

Sulit dipungkiri bahwa kompetisi dan kontestasi dalam pemilihan presiden diwarnai oleh tingginya kegaduhan yang terjadi di media massa, media elektronik, dan media sosial (medsos) sehingga sampai-sampai menyulut emosi masyarakat. Tak jarang masyarakat pun ikut terlibat dan mengundang keprihatinan tersendiri karena tidak sedikit di antaranya yang akhirnya harus berurusan dengan hukum. Terbukti, Menkopolkam menyebutkan bahwa ada

53 kasus *hoax* (berita bohong) dan 324 *hate speech* (ujaran kebencian) yang terjadi dan sebagian sudah diselesaikan secara hukum.⁵²

Tidak hanya hal-hal yang disebutkan diatas, tetapi banyak sekali isu-isu yang berkembang sehingga menjadikan pemilihan presiden 2019 memiliki daya tarik tersendiri di mata masyarakat. Dari sekian banyaknya isu, isu politik identitas lah yang paling sering menjadi sorotan media maupun tontonan masyarakat, terutama yang paling menonjol adalah isu identitas agama. Isu identitas agama sangat sering sekali dibawa-bawa oleh kedua paslon dalam masa pra kampanye, masa kampanye, bahkan pasca kampanye. Kedua belah pihak pun mengklaim bahwa merekalah paling mewakili suara umat Islam. Ditambah, penggunaan identitas agama dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan antara kedua pendukung pada pemilihan presiden tahun 2019 lalu.⁵³

Ada banyak sekali penggunaan-penggunaan isu identitas menjelang pemilihan presiden 2019. Akan tetapi, yang mengawali itu semua adalah pada saat tahun 2016, jauh sebelum pemilihan presiden dilaksanakan. Ahok pada saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak berhati-hati dan bijak ketika bersinggungan dengan hal-hal yang dianggap sensitif bagi umat islam. Ahok yang beragama kristiani, salah dalam mengartikan Surah Al-Maidah ayat 51. Hal ini menjadi perhatian dan kemarahan umat muslim diseluruh Indonesia khususnya DKI Jakarta, sehingga menimbulkan beberapa gerakan yang

⁵² R. Siti Zuhro, (2019), *Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019*, Volume 16 No. 1, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, h. 72.

⁵³ Ibid, h. 72.

dilakukan oleh umat muslim, salah satunya yang terbesar adalah gerakan 212 yang telah tercatat dalam sejarah.⁵⁴

Gambar 3.1 Gerakan 212



Sumber: <https://m.solopos.com>

Kemudian setelah kejadian dan gerakan bersejarah ini mencuatlah istilah ‘politik identitas’ pada waktu itu, banyak sekali pemberitaan tentang isu ini, semua media di Indonesia menyoroti dan masyarakat pun seperti menikmati tontonan ini. Sampai kemudian isu ini masih membekas beberapa tahun hingga menjelang pemilihan presiden 2019, dan pada akhirnya timbulah isu-isu baru yang berbau identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019 lalu.

Penjelasan yang sama juga di dikatakan oleh IW, beliau adalah tokoh Muhammadiyah Kota Palembang yang sekarang menjabat sebagai Pengurus Majelis Muhammadiyah Kota Palembang dan juga mengajar sebagai dosen di salah satu Universitas di Palembang. Beliau mengatakan bahwa:

“memang setelah peristiwa itu (gerakan 212) mencuat istilah politik identitas sebelumnya tidak ada istilah itu. Kampanye Prabowo di gelora bungkarno pun menjelaskan bahwa politik

⁵⁴ R Hady Syahputra Tambunan, (2019), Pilpres 2019 dan Agama, <https://www.kompasiana.com>, diakses pada 30 Agustus 2019.

*identitas agama pada waktu itu memang ada, orang-orang yang datang pada waktu itu menggunakan simbol-simbol islam seperti peci, sorban, baju gamis dan sebagainya, seolah-olah ingin mengisyaratkan bahwa paslon 02 didukung oleh umat muslim”.*⁵⁵

Dari penyampaian diatas, dapat dipahami bahwa bagaimana isu-isu identitas agama yang terjadi pada pemilihan presiden tahun 2019 lalu adalah diawali dari peristiwa gerakan 212 dan kemudian digunakan oleh salah satu paslon untuk merebut hati suara pemilih muslim dan isu agamalah dijadikan alat kampanyenya.

Senada apa yang disampaikan oleh tokoh tersebut diatas, PR salah satu masyarakat Kota Palembang berkenaan dengan gerakan 212, ia mengatakan bahwa:

*“menurut saya gerakan 212 mengawali isu-isu identitas pada pemilihan presiden tahun 2019. Kemudian, setelah kejadian itu dan menjelang pemilihan presiden tahun 2019 (masa kampanye) banyak sekali isu identitas agama yang berkembang dan sedikit banyaknya masyarakat terpengaruh akan hal itu dalam menentukan pilihannya, akan tetapi menurut saya pemilih muslim lebih mengarah ke Prabowo terutama pemilih muslim di Kota Palembang dikarenakan pengaruh isu-isu identitas agama tadi. Setiap kedatangan prabowo ke Kota Palembang banyak sekali masa yang beragama muslim memadati, karena terlihat dari pakaian yang digunakan.”*⁵⁶

Dari penyampaian tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor mencuatnya isu identitas agama pada pemilihan presiden 2019 adalah diawali oleh ketidakpuasan dan kemarahan umat muslim di berbagai wilayah di Indonesia kepada Ahok, sehingga terbentuklah beberapa gerakan dan salah

⁵⁵ Wawancara Tokoh Muhammadiyah Kota Palembang, Pada 08 Januari 2020.

⁵⁶ Wawancara, PR, Pada 7 Januari 2020.

satunya yang terbesar adalah gerakan 212. Kemudian, pasca gerakan 212 tadi, timbulah isu-isu identitas agama baru yang telah dibentuk oleh elite politik atau pendukung salah satu paslon, kemudian berdampak kepada pandangan atau mungkin saja pilihan masyarakat, terutama masyarakat Kota Palembang.

Dari peristiwa 212 yang sudah dijelaskan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa gerakan 212 pada waktu itu tidak membentuk politik identitas jenis instrumentalisme yang berarti identitas dalam hal ini agama dijadikan sarana elite politik maupun pendukung tertentu, kemudian mereka memanipulasi identitas tersebut untuk memobilisasi masa ataupun mengeksploitasi mereka untuk mencari suara sebanyak-banyaknya pada pemilihan presiden tahun 2019. Akan tetapi, gerakan 212 pada waktu itu membentuk politik identitas jenis konstruktivisme, identitas terbentuk dari proses sosial yang kompleks dari ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. Artinya, kejadian ketika Ahok salah dalam mengartikan Surah Al-Maidah, memicu rasa kepemilikan atau rasa kesadaran masyarakat bahwa agama mereka telah dihina, kemudian kesamaan-kesamaan tersebut secara kolektifitas mewujudkan kelompok sehingga terbentuklah peristiwa-peristiwa dalam hal ini adalah gerakan 212.

Selanjutnya, penunjukan Ma'ruf Amin sebagai cawapres, seolah-olah sebagai bentuk yang dilakukan untuk merebut hati pemilih muslim yang merasa kecewa dengan Jokowi karena isu yang mengatakan Jokowi adalah bagian dari Ahok yang merupakan penista agama. Ma'ruf Amin yang dikenal sebagai ulama besar dan waktu itu sedang menjabat sebagai Majelis Ulama

Indonesia (MUI) ditunjuk sebagai cawapres nomor urut satu mendampingi Joko Widodo. Padahal, Mahfud MD lah yang digadang-gadang akan mendampingi Jokowi sebagai Cawapres pada saat itu.

Gambar 3.2 momen pasca penunjukan Ma'ruf Amin sebagai cawapres 01



Sumber: <https://tirto.id>

Hal tersebut membuktikan bahwa memang ada penggunaan politik identitas instrumental, ketika isu identitas agama sengaja dibentuk untuk membentuk rasa simpati masyarakat kemudian mengexploitasinya, dan digunakan untuk mencari suara sebanyak-banyaknya.

Hal tersebut pun menjadi perhatian salah satu masyarakat Kota Palembang yakni AM, dan memberikan pendapat yang sama, ia mengatakan bahwa:

“menurut saya penunjukan Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi pada saat pemilihan presiden 2019 lalu adalah sebagai bentuk kubu mereka ingin menggait kembali suara umat muslim, yang telah merasa kecewa pada mereka karena disebabkan oleh kejadian Ahok (gerakan 212).”⁵⁷

⁵⁷ Wawancara, AM, Pada 5 Januari 2020.

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa, penunjukan Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi pada saat itu adalah dapat dikatakan salah satu bentuk isu identitas agama yang mereka buat untuk menggait kembali suara pemilih muslim, terutama di Kota Palembang.

Pendapat tentang isu penunjukan Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi pun disampaikan oleh SU, salah satu masyarakat Kota Palembang yang peneliti wawancarai, ia mengatakan bahwa:

“iya penunjukan Ma'ruf Amin sebagai cawapres Joko Widodo adalah bentuk untuk mencerca isu bahwa Jokowi itu bagian dari PKI. Sehingga dengan adanya hal ini, dapat diharapkan oleh kubu mereka pandangan orang yang berpikir seperti itu akan menghilang”.⁵⁸

Dari apa yang disampaikan oleh informan tersebut dapat dijelaskan bahwa, penunjukan Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi adalah bentuk untuk meng-*counter* isu yang mengatakan Jokowi itu bagian dari PKI.

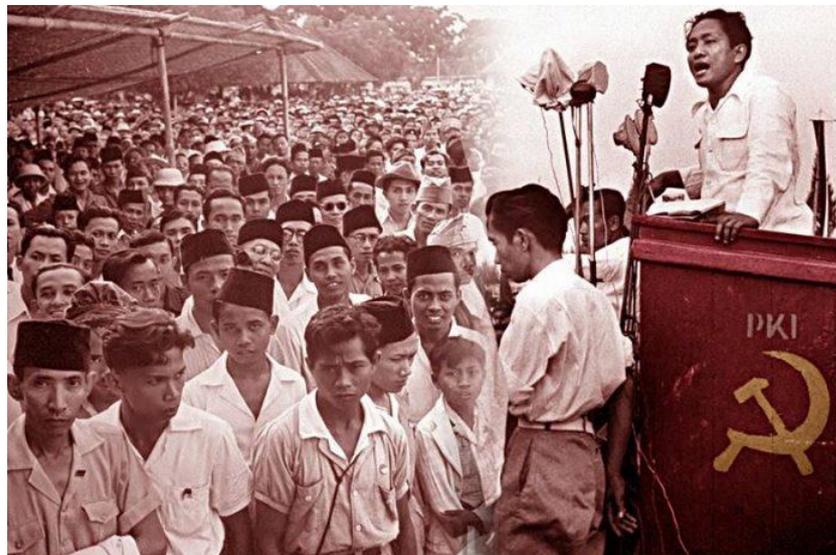
Beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa isu penunjukan Ma'ruf Amin sebagai cawapres untuk mendampingi Jokowi pada saat itu adalah sebagai hal yang dibentuk oleh pendukung O1 untuk menggait kembali suara pemilih muslim maupun mematahkan isu sebelumnya. Hal ini sesuai dengan konsep instrumentalisme dimana suatu identitas digunakan oleh elite politik atau pendukung tertentu untuk memobilisasi dan mengeksploitasi masa untuk mencari suara sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, Ma'ruf Amin digunakan sebagai figur untuk menggait masa yang pada saat itu dikenal sebagai ulama

⁵⁸ Wawancara, SU, Pada 27 Desember 2019.

besar dan sedang menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia, orang-orang dibelakang Ma'ruf Amin pun pastilah sosok-sosok agama, terutama dari NU.

Kemudian isu lainnya yakni tuduhan bahwa Jokowi bagian dari PKI. Isu ini adalah isu ulangan pada pilpres tahun 2014 yang lalu, Jokowi pada saat itu dituduh sebagai antek dari PKI (Partai Komunis Indonesia). Isu ini digunakan kembali menjelang pemilihan presiden tahun 2019, PKI yang dikenal oleh masyarakat lewat film G30SPKI, internet, media sosial dan sebagainya adalah kelompok yang sadis dan tidak mempercayai keyakinan atau tidak menganut agama apapun. Walaupun isu ini tidak terbukti kebenarannya, hal ini seperti menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat.

Gambar 3.3 isu tuduhan Jokowi PKI (komunis).



Sumber: <https://duta.co>

SA, salah satu masyarakat Kota Palembang yang diwawancarai mengatakan bahwa:

“untuk isu Jokowi dituduh bagian dari PKI saya rasa itu belum tentu kebenarannya perlu dibuktikan, mungkin itu hanya untuk mengalihkan isu agar suara Jokowi turun.”⁵⁹

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa, beliau tidak percaya atas isu PKI yang dituduhkan kepada Jokowi karena itu belum tentu kebenarannya dan hanya untuk mengalihkan isu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab dan yang tidak menginginkan Jokowi menang pada pemilihan presiden 2019.

Isu tuduhan Jokowi bagian dari PKI pun disampaikan oleh MR salah satu masyarakat Kota Palembang yang diwawancarai, ia mengatakan bahwa:

“iya saya mendengar isu yang mengatakan bahwa Jokowi dan antek-anteknya itu bagian dari PKI, seperti yang kita ketahui PKI (Komunis) itu kan tidak mengenal agama dan keyakinan apapun (tidak ada agama) saya khawatir akan hal itu. Kemudian PKI (komunis) itu kan kebanyakan dari Cina, apabila Jokowi terpilih lagi sebagai presiden maka akan banyak orang cina yang datang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan secara ilegal. Saya mengetahui isu ini dari media sosial, menurut saya isu ini sengaja dibuat oleh kubu 02, untuk mempengaruhi suara.”⁶⁰

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa ia mendengar isu tuduhan Jokowi dan antek-anteknya adalah PKI dan mengkhawatirkan apabila Jokowi terpilih menjadi presiden kembali, maka orang-orang cina akan banyak yang

⁵⁹ Wawancara, SA, Pada 5 Januari 2020

⁶⁰ Wawancara, MR, Pada 5 Januari 2020

berdatangan ke Indonesia untuk mencari pekerjaan karena Cina itu merupakan negara yang menganut Komunis.

Penjelasan tentang tuduhan bahwa Jokowi itu bagian dari PKI pun disampaikan oleh MR, salah satu masyarakat Kota Palembang, ia mengatakan bahwa:

“iya saya mendengar isu ini, memang banyak sekali pemberitaan pada waktu itu tentang isu PKI yang dituduhkan kepada Jokowi dari sosial media, berita di televisi maupun dari mulut ke mulut di lingkungan saya. Menurut saya isu ini digunakan oleh oknum untuk menggiring opini agar masyarakat percaya akan hal ini dan kemudian membenci kubu 01, saya rasa isu ini belum tentu kebenarannya, bisa saja isu ini sengaja dibuat oleh kubu 02 untuk mendapatkan suara.”⁶¹

Dari penyampaian diatas dapat diketahui bahwa ia berpendapat bahwa isu PKI (komunis) yang dituduhkan kepada Jokowi itu belum tentu kebenarannya, isu ini hanya digunakan oknum untuk membuat agar masyarakat benci kepada Jokowi dan secara otomatis suara Jokowi pada pemilihan presiden 2019 akan menurun.

Pendapat tentang isu PKI pun disampaikan yakni oleh IS, beliau adalah tokoh agama NU (Nahdlatul Ulama) Kota Palembang, beliau mengatakan bahwa:

“isu-isu agama yang muncul pada pemilihan presiden 2019 yang lalu adalah berawal dari isu PKI, Jokowi dituduh bagian dari antek PKI, dibuktikan dengan berita-berita, media sosial dan sebagainya yang menandakan kemunculan simbol-simbol PKI. Ulama khawatir akan hal ini kemudian berencana menunjuk Prabowo dan wakilnya dari ulama sebagai capres dan cawapres. Kemudian mendukung Prabowo dengan menyatakan dukungan

⁶¹ Wawancara, MR, Pada 27 Desember 2019.

lewat ijtima' ulama serta penandatanganan MOU dengan Prabowo, walaupun wakilnya bukan dari ulama pada saat itu.”⁶²

Dari apa yang dijelaskan dari informan tersebut dapat dimaknai bahwa kemunculan isu-isu identitas agama pada pemilihan presiden 2019 seperti dukungan ulama terhadap Prabowo adalah bentuk kekhawatiran ulama akan bangkit kembalinya PKI, sehingga mereka mengambil langkah untuk meredam hal ini dengan menunjuk Prabowo sebagai capres untuk menantang petahana yang diisukan bagian dari PKI, sehingga petahana tidak dapat terpilih kembali, hal ini pun berlanjut dengan ulama yang secara resmi menyatakan mendukung Prabowo (Ijtima' Ulama) walaupun tidak dengan berpasangan dengan ulama yang pada saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Penjelasan mengenai isu identitas agama yang disampaikan oleh beberapa informan di atas kemudian telah peneliti analisis, menunjukkan bahwa tuduhan yang mengatakan Jokowi bagian dari PKI merupakan hal yang sengaja dibentuk oleh pendukung 02 untuk menurunkan suara 01, sehingga suara 01 bisa saja beralih ke 02. Hal tersebut sesuai dengan konsep instrumentalisme yang artinya pendukung 02 membentuk isu Jokowi bagian dari PKI untuk memobilisasi dan mengeksploitasi masa agar beranggapan negatif kepada Jokowi untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya pada pemilihan presiden 2019 lalu. Tetapi, ada hal yang menarik dari wawancara yang peneliti temukan. Dari beberapa informan di atas yang menjelaskan tentang isu tuduhan Jokowi PKI, ada yang seperti membela atau menyanggah tuduhan tersebut.

⁶² Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Palembang, Pada 5 Januari 2020

Informan-informan yang menyanggah ini adalah informan yang memiliki kesamaan suku dengan Jokowi yakni suku Jawa. Hal ini sama seperti konsep identitas dari Stuart Hall yakni konstruktivisme, yaitu identitas terbentuk karena adanya ikatan-ikatan kultural yang sama, hal ini sesuai dengan beberapa informan diatas, mereka memiliki kesamaan suku dengan Jokowi, sehingga mereka menginginkan pemimpin yang memiliki kesamaan kultural dengan mereka.

Kemudian, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang secara resmi menyatakan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pilpres 2019, keputusan tersebut diambil setelah Prabowo menandatangani pakta integritas yang diajukan oleh GNPF. Pakta Integritas itu memuat 17 poin kontrak politik yang ditandatangani Prabowo dan perwakilan peserta Ijtima Ulama.

Gambar 3.4 Momen Dukungan GNPF Ulama Kepada Prabowo.



Sumber: <https://www.republika.co.id>

Salah satu masyarakat Kota Palembang, AM juga berpendapat tentang dukungan yang diberikan ulama kepada Prabowo, ia mengatakan:

“iya saya terpengaruh akan isu ini, karena ulama sudah menyatakan dukungan mereka kepada Prabowo dan mereka juga mengatakan seperti apa pemimpin yang harus dipilih nantinya, maka saya mengikuti hal ini, karena di dunia ini kita harus berpatokan kepada Al-Qur’an, Hadis, dan para ulama. Kemudian saya juga melihat Prabowo dan Ustad Abdul Somad (UAS) pada saat itu duduk bersama, dan UAS mengatakan bahwa dia bercerita dengan temannya yang seorang ulama juga, temannya berkata bahwa Prabowo akan terpilih menjadi presiden”⁶³

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bagaimana ia terpengaruh akan isu yang menyatakan Prabowo didukung oleh ulama karena ia meyakini bahwa orang yang beragama muslim itu harus berpatokan kepada Al-Qur’an, Hadis, dan para ulama.

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat kota Palembang yaitu PR, ia mengatakan bahwa:

“saya berpatokan kepada ulama, apa yang ulama katakan akan saya pilih. Karena ulama telah memberikan dukungan kepada Prabowo khususnya Habib Rizieq, maka akan saya ikuti. Saya juga melihat di media sosial bagaimana ulama-ulama di berbagai wilayah memberikan dukungan kepada Prabowo, hal itu membuat saya merubah pandangan saya sebelumnya yang menyatakan bahwa Prabowo itu radikal dan pelanggar HAM.”⁶⁴

⁶³ AM Op.Cit.

⁶⁴ PR, Op.Cit.

Pendapat tersebut menyatakan bahwa bagaimana seorang yang dulunya berpandangan negatif ke Prabowo dan sekarang berubah, dikarenakan isu identitas agama yang menjelaskan bahwa ulama memberikan dukungan kepada Prabowo.

Yang menarik hasil ijtima ulama tersebut justru mendapat sanggahan dari kelompok umat Islam lainnya karena dinilai tidak mewakili ulama-ulama lainnya. Sebab, NU, misalnya, tidak merasa turut terlibat dalam ijtima' ulama tersebut. Sebagai contoh, sekitar 400 kiai dan pengurus pesantren seluruh Indonesia menyatakan mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo/Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebagai "ayah biologis PKB", secara de facto pilihan politik NU struktural, khususnya, berada seiring sejalan dengan pilihan politik PKB, yakni menjadi bagian dari koalisi petahana. Hal tersebut bisa dipahami dengan terpilihnya Ma'ruf Amin, ketua MUI dan ketua umum syuriah PBNU, sebagai cawapres Jokowi. Pilihan Jokowi tersebut tidak saja dimaksudkan untuk meraih dukungan umat Islam, tetapi juga sekaligus untuk membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pemerintahannya anti Islam.⁶⁵

Dari pemaparan mengenai isu identitas agama yang disampaikan oleh beberapa informan diatas kemudian telah peneliti analisis, menunjukkan bahwa mengenai isu ijtima' ulama yang menyatakan dukungan mereka kepada Prabowo diatas, menunjukkan bahwa pendukung 02 membentuk isu agar mendapatkan simpati masyarakat terutama umat muslim dan mengharapkan pemilih muslim berpihak kepada mereka untuk mendapatkan suara sebanyak-

⁶⁵ Siti Zuhro, Op.cit., R., h. 74.

banyaknya pada pemilihan presiden 2019 lalu. Peneliti mengatakan demikian karena hal ini diperlihatkan kepada masyarakat melalui televisi, media sosial dan sebagainya, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Prabowo itu didukung oleh ulama, bisa saja isu ini tidak diperlihatkan apabila tidak ada niatan seperti demikian. Hal ini sesuai dengan konsep instrumentalisme dari Stuart Hall, ketika isu identitas agama dijadikan alat politik untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya

Isu selanjutnya adalah yang mengatakan bahwa Prabowo merupakan islam radikal atau islam garis keras. Berkembangnya isu kedekatan Prabowo dengan gerakan Islam radikal yang hendak menegakkan khilafah di Indonesia tak lepas dari sejumlah insiden yang menyertainya selama kampanye. Pada Maret 2019 lalu, saat melakukan safari politik di Cianjur, Jawa Barat, Prabowo terlihat menggunakan mobil dengan nomor polisi B 264 RIS. Mobil tersebut milik Chep Hermawan, Ketua Umum Gerakan Reformasi Islam (Garis), yang diduga pernah memberangkatkan 156 warga Indonesia ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Selain itu, saat berkampanye di Manado, Sulawesi Utara, bendera bertuliskan kalimat tauhid yang disebut al-Liwa, berkibar di tengah kerumunan massa. Di Indonesia, bendera ini identik dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang konsisten menyuarakan konsep khilafah.⁶⁶

⁶⁶ Irfan Teguh, (2019), Prabowo, *Isu Khilafah, dan Sejarah Gerakan Islam Politik Indonesia*, <https://tirto.id>, diakses ada 11 Januari 2020.

Mengenai isu yang dituduhkan bahwa Prabowo bagian dari islam radikal juga dijelaskan oleh salah satu Kota Palembang yakni RK saat diwawancarai, ia mengatakan bahwa:

“isu yang dituduhkan kepada Prabowo yang menjelaskan bahwa prabowo merupakan bagian dari kelompok-kelompok islam radikal, menurut saya itu hanya tuduhan yang belum pasti kebenarannya. Saya rasa itu hanya itu pengalihan isu dimana waktu itu Prabowo secara langsung telah didukung oleh ulama, jadi isu tersebut dibuat agar masyarakat khususnya muslim tidak memilih Prabowo”.⁶⁷

Dari penyampaian tersebut dapat dipahami bahwa isu yang mengatakn bahwa Prabowo merupakan bagian dari islam radikal adalah untuk menyerang isu Prabowo didukung oleh ulama oleh oknum-oknum kemudian diharapkan akan menurunkan suara pemilih muslim paslon 02 pada pemilihan presiden 2019.

Hal senada juga disampaikan oleh AZ salah satu masyarakat Kota Palembang, saat diwawancarai ia mengatakan:

“menurut saya tuduhan isu islam radikal kepada Prabowo merupakan tuduhan yang tidak berdasar, karena pada saat ia kampanye mungkin saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menyusup ke keramaian masa yang sedang berkumpul. Saya rasa isu ini belum tentu kebenarannya”.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara, RK, Pada 30 Desember 2019.

⁶⁸ Wawancara, AZ, Pada 9 Januari 2020.

Dari penyampaian tersebut dapat dipahami bahwa isu yang mengatakan bahwa Prabowo merupakan bagian dari islam radikal adalah tuduhan yang belum tentu kebenarannya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dari pemaparan mengenai isu identitas agama yang disampaikan oleh beberapa informan kemudian telah peneliti analisis, menunjukan bahwa tuduhan yang mengatakan bahwa Prabowo adalah bagian dari islam radikal adalah dibentuk oleh pendukung 01, hal ini untuk memobilisasi dan mengeksploitasi masa agar beranggapan negatif kepada Prabowo agar masyarakat berpandangan lain dan bisa saja menurunkan suara 02 dan kemudian pasangan calon 01 diuntungkan akan hal ini, tujuannya untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya pada pemilihan presiden 2019 yang lalu.

Hal-hal inilah yang mewarnai pemilihan presiden 2019 yang lalu, kedua kubu dari pasangan calon bersaing untuk merebut suara muslim. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu dan terbukti terjadi pada pemilihan presiden 2019 yang lalu. Masing-masing kubu dan oknum-oknum tertentu seperti memainkan identitas agama khususnya umat beragama muslim untuk menggiring pandangan mereka terhadap paslon yang satu dengan yang lain sehingga mungkin saja mempengaruhi sikap politik mereka untuk menentukan pilihan pada pemilihan presiden tahun 2019.

Dalam pemilihan presiden tahun 2019 lalu, memang penggunaan-penggunaan politik identitas itu sengaja dibentuk dan dibuat oleh kedua kubu (instrumentalis) untuk mencari simpati masyarakat dan kemudian mengeksploitas masyarakat tersebut untuk mengharapkan dukungan mereka dan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Seperti yang dikatakan oleh Stuart Hall pada teori Instrumentalisme dan didukung oleh pernyataan Achmad Munjid, ketika identitas digunakan sebagai sarana oleh elite politik ataupun memanipulasi identitas tersebut untuk mencari simpati masyarakat kemudian mengeksploitasinya dan mengharapkan dukungan mereka untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, hal inilah yang terjadi pada pemilihan presiden tahun 2019, beberapa kasus membuktikan bahwa masing-masing kubu dan pendukung menggunakan isu identitas agama sebagai sarana untuk bertahan maupun menyerang, kemudian mengharapkan simpati dan dukungan masyarakat, untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

B. Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Sikap politik individu masyarakat terhadap suatu objek politik dipengaruhi oleh 3 komponen, yakni kognitive, afektif dan evaluatif. Ketiga komponen inilah yang menjadi proses pembentukan sikap politik suatu individu. Bagaimana sikap politik masyarakat melihat objek politik yakni isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019 kemudian mengetahui,

mempercayai dan merasakan hal itu. Selanjutnya mereka mengambil bagian dalam proses tersebut, proses ini dinamakan dengan istilah partisipasi politik.

Sikap politik dan partisipasi politik hampir sama konsepnya, akan tetapi hasilnya yang membedakan. Partisipasi politik melihat bagaimana masyarakat ikut berperan atas suatu objek politik dalam hal ini melihat isu identitas agama pada pilpres 2019, sedangkan sikap politik juga melihat seperti apa pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam melihat isu identitas agama, tetapi hasilnya nanti akan mempengaruhi kemana pandangan mereka terhadap objek politik dan memutuskan pilihan masyarakat tersebut pada pemilihan presiden tahun 2019.

Maka, partisipasi politik adalah seperti apa keterlibatan dan pengetahuan individu pada suatu objek politik dalam hal ini isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu, kemudian pengetahuan dan keterlibatan ini menggambarkan sikap politik individu tersebut, dalam hal ini adalah masyarakat Kota Palembang.

Sikap politik dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni apatis, spectator dan gladiator. Ketiga hal inilah yang akan menjawab permasalahan tentang sikap politik masyarakat Kota Palembang terhadap isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019.

1. Apatis

Sikap politik apatis merupakan suatu sikap yang menarik diri dari proses politik. Dalam hal ini, masyarakat yang tidak peduli, menarik diri, ataupun tidak mau tahu dikarenakan oleh keadaan atau keinginannya sendiri

dalam hal ini adalah dari proses pemilihan presiden 2019 beberapa waktu yang lalu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa masyarakat Kota Palembang mengenai isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019, ada beberapa informan yang termasuk dalam sikap politik jenis ini. Sebagian dari mereka adalah pemilih pemula, dan sebagiannya lagi karena disibukkan oleh pekerjaan, sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk melihat perkembangan apa saja pada pemilihan presiden tahun 2019.

BM salah satu masyarakat Kota Palembang yang peneliti telah wawancarai, menyatakan bahwa:

“saya hanya memilih pada pilpres 2019 yang lalu, tapi saya tidak tahu apa-apa mengenai pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu. Saya sama sekali tidak tertarik dengan hal yang berbau politik.”⁶⁹

Hal senada juga disampaikan oleh SR, ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui apa-apa mengenai pemilihan presiden tahun 2019, saya hanya memilih salah satu kandidat pada waktu itu. Saya tidak menyukai politik.”⁷⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh MR salah satu masyarakat Kota Palembang, ia mengatakan bahwa:

“Saya memilih, tapi saya tidak mengetahui apapun mengenai pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu. Saya tidak tertarik dengan politik.”⁷¹

⁶⁹ Wawancara, BM, Pada 2 Januari 2020.

⁷⁰ Wawancara, SR, Pada 2 Januari 2020.

⁷¹ Wawancara, MR, Pada 2 Januari 2020.

Hal senada juga disampaikan oleh MD, ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak memilih siapapun dan tidak mengetahui apa saja mengenai pilpres 2019 yang lalu karena saya tidak menyukai politik.”⁷²

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh MF, ia mengatakan bahwa:

“ya, saya ikut memilih, tapi tidak mengikuti perkembangan pilpres waktu itu. Karena baru pertama kali, jadi saya rasa aman-aman saja.”⁷³

Beberapa hasil wawancara diatas merupakan wawancara peneliti dengan pemilih pemula, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pemilih pemula sama sekali tidak tertarik dengan hal yang berbau politik. Hal ini sesuai dengan sikap politik apatis, dimana masyarakat yang tidak peduli, menarik diri, ataupun tidak mau tahu dikarenakan keadaan atau keinginan mereka sendiri.

Kemudian wawancara berikutnya, RI salah satu masyarakat Kota Palembang, mengenai pemilihan presiden tahun 2019, ia mengatakan bahwa:

“saya golput (tidak memilih) dan tidak mengikut perkembangan apapun pada pemilihan presiden tahun 2019 lalu, saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya dan juga saya tidak terlalu tertarik dengan politik.”⁷⁴

⁷² Wawancara, MD, Pada 2 Januari 2020.

⁷³ Wawancara, MF, pada 30 Desember 2019.

⁷⁴ Wawancara, RI, Pada 2 Januari 2020.

Dari penyampaian diatas dapat dijelaskan bahwa ia bersikap apatis dikarenakan disibukkan oleh pekerjaan yang terlalu padat sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk melihat apa saja perkembangan pada pemilihan presiden tahun 2019.

Hal yang sama juga disampaikan oleh SM, ia mengatakan bahwa:

“Saya hanya memilih salah satu kandidiat pada pemilihan presiden 2019 lalu, tapi saya tidak mengetahui apapun mengenai pilpres 2019 lalu. Saya juga sibuk mencari uang.”⁷⁵

Hal senada juga disampaikan oleh MA, ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui apa-apa mengenai pemilihan presiden 2019 lalu, saya hanya memilih pada waktu itu. Saya juga sibuk berdagang”⁷⁶

Dari penyampaian wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa, mereka bersikap apatis karena tidak tertarik dengan hal yang berbau politik. Menariknya, kedua-keduanya adalah perempuan yang sama-sama mencari uang dengan berdagang.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan yang telah dijelaskan diatas, beberapa informan yang bersikap apatis pada saat pemilihan presiden tahun 2019 terutama mengenai isu identitas agama dikarenakan mereka tidak tertarik dengan hal yang berbau politik, ditambah dengan kesibukkan dalam pekerjaan.

⁷⁵ Wawancara, SM, Pada 27 Desember 2019.

⁷⁶ Wawancara, MA, Pada 5 Januari 2020.

2. Spectator

Sikap politik spectator merupakan orang yang sedikit-banyaknya mengetahui dan ikut memilih dalam pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Artinya, dalam sikap spectator pemilih cenderung dapat dipengaruhi dalam menentukan pilihannya. Orang yang termasuk jenis ini bisa dikatakan juga sebagai penonton, karena sedikit banyaknya mereka mengetahui apa saja yang terjadi pada pemilihan 2019 lalu, tapi tidak terjun langsung dalam keterlibatan mendukung suatu pasangan calon.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa masyarakat Kota Palembang mengenai isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019, ada beberapa informan yang termasuk dalam sikap politik jenis ini. Masyarakat yang termasuk dalam sikap politik jenis ini tidak mengenal umur dan pekerjaan, semuanya bervariasi.

Mengenai pemilihan presiden tahun 2019, AM salah satu masyarakat Kota Palembang, ia mengatakan bahwa:

“saya memilih pada pilpres 2019 lalu, mengenai isu identitas agama saya cukup mengikuti perkembangannya, saya tahu isu Ma’ruf Amin ditunjuk sebagai cawapres 01 untuk menggait suara pemilih muslim, saya melihat isu ini dari media sosial dan beberapa artikel.”⁷⁷

Dari penyampaian wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa informan tersebut bersikap spectator karena ia hanya menonton atau sekedar mengikuti perkembangan terutama isu identitas agama pada pemilihan

⁷⁷ AM, Op.Cit.

presiden tahun 2019, tapi ia tidak terjun langsung ataupun mengkampanyekan salah satu kandidat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh SU, ia mengatakan bahwa:

“iya saya memilih dan mengikuti perkembangan pada saat pemilihan presiden tahun 2019 lalu, mengenai isu identitas agama saya mengetahui isu tentang penunjukan Ma’ruf Amin itu adalah sebagai bentuk untuk mengangkat suara pemilih muslim karena sebelumnya Jokowi dituduh bagian dari PKI (komunis). Saya melihat isu ini dari televisi.”⁷⁸

Dari penyampaian diatas dapat dijelaskan bahwa informan tersebut bersikap spectator dimana ia hanya mengikuti perkembangan mengenai pemilihan presiden tahun 2019 terutama isu identitas agama, tapi ia tidak secara langsung mendukung atau mengkampanyekan pasangan tertentu.

Selanjutnya, salah satu masyarakat Kota Palembang yakni MR, mengenai pemilihan presiden tahun 2019, ia mengatakan bahwa:

“saya mengikuti perkembangan dan juga memilih salah satu kadidiat pada pilpres kemarin, mengenai isu identitas agama saya hanya mengetahui bahwa Jokowi dituduhkan sebagai bagian dari PKI dari media sosial dan obrolan sehari-hari. Menurut saya agama tidak boleh dicampur adukan dengan politik.”⁷⁹

Dari penyampaian tersebut dapat disimpulkan bahwa informan tersebut bersikap spectator, ia hanya mengikuti perkembangan pilpres 2019 lalu melalui media sosial dan obrolan sehari-hari. Ia tidak secara langsung mendukung suatu calon maupun mengkampanyekannya.

⁷⁸ SU, Op.Cit.

⁷⁹ MR, Op.Cit.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh FF, ia mengatakan bahwa:

“Saya memilih, tapi saya tidak terlalu mengikuti perkembangan di pilpres 2019 lalu. Saya tidak tahu isu identitas agama, saya hanya tahu isu tuduhan money politik untuk kedua calon 01 dan 02.”⁸⁰

Dari penyampaian diatas dapat dijelaskan bahwa informan tersebut bersikap spectator, ia tidak mengetahui isu identitas agama, tapi hanya mengetahui isu money politik yang dituduhkan kepada kedua paslon. Kemudian ia tidak terlibat langsung dalam mendukung masing-masing paslon.

Hasil wawancara berikutnya, yakni YR salah satu masyarakat Kota Palembang, ia mengatakan bahwa:

“saya ikut serta dalam pemilihan presiden 2019 lalu dan cukup mengikuti perkembangan beritanya. Menurut saya pilpres 2019 aman-aman saja, mengenai isu identitas agama saya tidak tahu, tapi saya mengetahui isu kampanye hitam dan ada keikutsertaan Ketua RT dalam memenagkan salah satu paslon.”⁸¹

Dari penyampaian wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa informan tersebut bersikap spectator, ia hanya mengikuti perkembangan berita mengenai pilpres 2019 lalu melalui media sosial, spanduk dan obrolan sehari-hari. Ia juga tidak mengkampanyekan salah satu paslon.

Hal yang sama juga disampaikan oleh RK, ia mengatakan bahwa:

“ya saya ikut serta dan mengikuti perkembangan berita pada pilpres 2019 lalu. Mengenai isu identitas agama, saya tahu dari

⁸⁰ Wawancara, FF, Pada 27 Desember 2019.

⁸¹ Wawancara, YR, Pada 30 Desember 2019.

media sosial bahwa Prabowo dituduh bagian dari islam radikal. Saya tidak terpengaruh akan isu ini, dan tetap memilih paslon sesuai pendirian saya.”⁸²

Dari penyampaian diatas dapat dijelaskan bahwa informan tersebut hanya mengikuti dan melihat perkembangan pemilihan presiden 2019 lalu terutama isu identitas agama, akan tetapi tidak terlibat dalam mendukung maupun mengkampanyekan salah satu paslon. Artinya, ia termasuk dalam jenis sikap politik spectator.

Hasil wawancara lainnya yakni informan yang bernama DA, ia mengatakan bahwa:

“Saya ikut memilih dan cukup mengikuti isu pada pilpres kemarin. Mengenai isu identitas agama saya tidak tahu, tapi saya tahu isu yang menuduhkan bahwa tokoh masyarakat besar di Palembang mendukung Prabowo baik dalam bentuk moril dan materil. Saya tahu isu ini dari obrolan sehari-hari.”⁸³

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa informan diatas hanya mengikuti isu pada pilpres 2019 lalu dalam bentuk obrolan sehari-hari, tapi ia tidak secara langsung mendukung salah satu paslon pada pemilihan presiden 2019 lalu. Artinya, informan tersebut termasuk dalam sikap politik spectator.

Hasil wawancara lainnya, SA salah satu masyarakat Kota Palembang, ia mengatakan bahwa:

“saya memilih dan cukup mengikuti perkembangan pada pilpres 2019. Mengenai isu identitas agama, saya tahu isu yang mengatakan bahwa Jokowi bagian dari PKI, menurut saya isu ini belum tentu kebenarannya, bisa saja isu ini dibuat oleh

⁸² RK, Op.Cit.

⁸³ Wawancara, DA, Pada 2 Januari 2020.

pendukung 02 untuk menurunkan suara Jokowi. Saya tidak terpengaruh akan isu ini.”⁸⁴

Dari penyampaian tersebut dapat dijelaskan bahwa informan diatas tidak mendukung salah satu paslon secara langsung ataupun mengkampanyekannya, tapi hanya menonton dan mengikuti perkembangan pilpres 2019 lalu terutama yang berkaitan dengan isu identitas agama. artinya, informan tersebut termasuk dalam sikap politik jenis spectator.

Hasil wawancara lainnya, MR salah satu masyarakat Kota Palembang, mengenai pemilihan presiden tahun 2019, ia mengatakan:

“saya ikut memilih dan mengenai isu identitas agama saya hanya tahu dari media sosial dimana isu yang menyebutkan bahwa Jokowi itu adalah bagian dari PKI (komunis) dan pada masa pemerintahan Jokowi sebelumnya banyak sekali orang Cina yang datang ke Indonesia secara ilegal, orang komunis ini kan kebanyakan dari Cina, saya khawatir nanti akan lebih banyak lagi orang Cina secara ilegal datang ke Indonesia.”⁸⁵

Dari penyampaian diatas dapat dijelaskan bahwa informan tersebut hanya mengikuti dan mengetahui isu pada pemilihan presiden tahun 2019 dan tidak terlibat langsung dalam mendukung ataupun mengkampanyekan salah satu paslon. Artinya, ia termasuk dalam sikap politik jenis spectator.

Wawancara lainnya yakni dari MA, ia mengatakan bahwa:

“Pada pemilihan presiden 2019 lalu saya memilih dan mengenai isu identitas agama saya tidak terlalu tahu, tapi saya tahu dari media sosial isu tentang money politic yang dilakukan oleh kedua paslon. Saya tidak terlalu percaya akan isu ini.”⁸⁶

⁸⁴ SA, Op.Cit.

⁸⁵ MR, Op.Cit.

⁸⁶ Wawancara, MA, Pada 2 Januari 2020.

Dari penyampaian diatas dapat dijelaskan bahwa informan tersebut hanya mengetahui dari media sosial isu tentang money politic yang di tuduhkan kepada masing-masing pasangan calon, ia tidak terlibat langsung dalam mendukung ataupun mengkampanyekan salah satu paslon. Artinya, informan ini termasuk dalam sikap politik jenis spectator.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ST, ia mengatakan bahwa:

“Mengenai pemilihan presiden tahun 2019 lalu saya memilih dan untuk isu identitas agama saya tidak terlalu tahu, saya hanya tahu dari media sosial tentang isu yang menyebutkan bahwa Prabowo adalah pelanggar HAM tahun 1998, tapi isu ini belum tentu kebenarannya.”⁸⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa informan tersebut hanya melihat salah satu isu dari media sosial, ia tidak terlibat langsung dalam mendukung atau mengkampanyekan salah satu paslon. Hal ini, menunjukkan bahwa informan ini merupakan bagian dari sikap politik spectator.

Kemudian informan lain PA, mengenai pemilihan presiden tahun 2019, ia mengatakan bahwa:

“untuk pilpres 2019 lalu saya memilih dan untuk perkembangan berita ataupun isu yang berkembang saya cukup mengikuti. Untuk isu identitas agama saya tidak terlalu tahu, saya melihat di media sosial bahwa pilpres 2019 lalu sangat banyak sekali menimbulkan kontroversi dan banyak sekali berita hoax yang dituduhkan kepada masing-masing calon. Sampai sekarang pun kontroversi tersebut sampai membelah dua kelompok, kelompok satu mendukung Jokowi dan satunya mendukung Prabowo.”⁸⁸

⁸⁷ Wawancara, ST, Pada 2 Januari 2020.

⁸⁸ Wawancara, PA, Pada 27 Desember 2019.

Dari penyampaian dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa ia termasuk dalam sikap politik jenis spectator, informan tersebut hanya mengetahui dan menonton isu-isu pada pemilihan presiden tahun 2019 lalu, tetapi tidak mendukung secara langsung dan mengkampanyekan salah satu paslon.

Wawancara lainnya mengenai pemilihan presiden tahun 2019, FM, ia mengatakan bahwa:

“iya saya ikut sebagai pemilih pemula dan cukup mengikuti perkembangan pilpres 2019 yang lalu. Saya mengetahui isu dari media sosial yang mengatakan bahwa Prabowo itu islami, tetapi itu belum tentu kebenarannya. Kemudian, menurut saya banyak sekali konflik-konflik pada pemilihan presiden tahun 2019.”⁸⁹

Dari penyampaian diatas dapat dijelaskan bahwa informan tersebut mengetahui isu pada pilpres 2019 lalu melalui media sosial, ia tidak mendukung secara langsung ataupun mengkampanyekan salah satu paslon. Artinya, informan tersebut termasuk dalam sikap politik jenis spectator. Menariknya, informan ini merupakan pemilih pemula pada pemilihan presiden 2019.

Hasil wawancara lainnya mengenai isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019, AZ, ia mengatakan:

“ikut memilih dan mengikuti perkembangan pilpres 2019 lalu. Saya melihat isu identitas agama melalui televisi, salah satunya adalah Jokowi dituduh agamanya non-muslim atau tidak memiliki agama. Kemudian isu lainnya datang dari Prabowo, dimana Prabowo dituduh bagian dari islam radikal.”⁹⁰

⁸⁹ Wawancara, FM, Pada 9 Januari 2020.

⁹⁰ AZ, Op.cit

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa informan tersebut hanya mengetahui isu pada pemilihan presiden tahun 2019, tetapi tidak ikut serta dalam mendukung atau mengkampanyekan suatu calon. Informan ini termasuk dalam sikap politik jenis spectator

Dari hasil pemaparan dari wawancara mengenai isu identitas pada pemilihan presiden tahun 2019, peneliti menemukan beberapa masyarakat Kota Palembang yang termasuk sikap politik jenis spectator, mereka hanya melihat, menonton dan mendengar isu pada pilpres 2019 terutama isu identitas agama, tetapi tidak secara langsung mendukung ataupun mengkampanyekan salah satu paslon. Sebagian dari mereka ada yang melihat dari media sosial, televisi, media online, obrolan sehari-hari dan sebagainya.

3. Gladiator

Sikap politik gladiator merupakan sikap yang ditunjukkan kepada orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik. Artinya mereka yang secara aktif mengikuti proses politik pada pemilihan presiden 2019 yang lalu mulai dari pengetahuan mereka terhadap perkembangan pada pemilihan presiden 2019 terutama isu identitas agama, maupun mereka yang terlibat langsung dalam mendukung dan mengkampanyekan salah satu pasangan calon pada saat itu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informan masyarakat Kota Palembang mengenai isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019, peneliti menemukan informan

yang termasuk dalam sikap politik jenis gladiator, masing-masing dari mereka mendukung dan mengkampanyekan paslon yang berbeda. Berikut ini adalah hasil wawancaranya.

Salah satu masyarakat Kota Palembang yang peneliti wawancari mengenai isu identitas agama pada pemilihan presiden tahun 2019, berinisial AO, ia mengatakan bahwa:

“Mengenai pilpres 2019 lalu, saya memilih dan saya mengikuti perkembangan beritanya. Jika ditanya isu yang dituduhkan kepada Jokowi saya rasa itu tidak benar. Kemudian, penunjukan Ma'ruf Amin sebagai cawapres untuk mendampingi Jokowi, menurut saya itu untuk menggait kembali suara untuk paslon 01 terutama dari suara pemilih muslim. Kemudian, pada saat saya mendapati seseorang dalam lingkungan saya yang menjelek-jelekan kubu 01, akan saya sanggah dan saya luruskan, bahwa kubu 01 itu tidak seperti itu, begitupun di media sosial, saya mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Jokowi sebelumnya infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia sudah baik dan merata, apabila Jokowi terpilih lagi menjadi presiden, saya yakin Indonesia akan lebih baik. Saya juga mengikuti kampanye kubu 01 di Kota Palembang.”⁹¹

Dari penyampaian diatas dapat dijelaskan bahwa informan tersebut sangat fanatik dalam mendukung paslon 01, dibuktikan dengan pernyataan informan tersebut diatas. Artinya, informan tersebut termasuk dalam sikap politik jenis gladiator.

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh PR, akan tetapi ia mendukung paslon yang berbeda, ia mengatakan bahwa:

“mengenai pilpres 2019 lalu saya otomatis memilih dan sangat mengikuti perkembangan beritanya terutama dari media sosial. Tuduhan-tuduhan yang mengarah ke Prabowo seperti isu Islam

⁹¹ Wawancara, AO, Pada 14 Januari 2020.

garis keras, agama prabowo bukan islam, prabowo tidak bisa sholat, ini hanya untuk menurunkan suara beliau. Sebelumnya, saya tidak terlalu mendukung prabowo menjadi presiden, karena waktu itu Prabowo dituduhkan sebagai pelanggar HAM. Tetapi, setelah ulama-ulama besar menyatakan dukungannya kepada Prabowo, saya merubah pandangan saya terhadap beliau dan memaklumi isu tentang pelanggaran HAM nya tersebut. Kemudian, setiap kali saya mendapatkan ada yang menjelekkan kubu 02 baik di lingkungan saya maupun di media sosial, maka akan saya bantah dan saya luruskan, bahwa prabowo bukan orang yang seperti itu, di setiap kampanye kubu 02 pun saya selalu menghadiri kampanye tersebut.”⁹²

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa informan tersebut termasuk dalam sikap politik jenis gladiator, informan diatas sangat fanatik dalam mendukung dan mengkampanyekan kubu 02, baik di lingkungannya maupun di media sosial. Di setiap paslon kampanye kubu 02 di Palembang pun ia selalu menghadirinya.

Berdasarkan penyampaian kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa kedua informan tersebut termasuk sikap politik jenis gladiator. Kedua informan tersebut mengetahui dan mengikuti perkembangan pemilihan presiden tahun 2019 lalu terutama mengenai isu identitas agama. Kemudian kedua informan tersebut sangat fanatik dalam memberikan dukungan dan menyuarakan pilihannya masing-masing. Peneliti juga menemukan hal yang menarik pada saat pemilihan presiden 2019 lalu, yakni apabila kedua pendukung masing-masing pasangan calon di pertemuan, dan keduanya berdialog membahas mengenai isu yang dituduhkan kepada calon yang mereka dukung, maka yang terjadi adalah pembenaraan

⁹² PR, Op.Cit.

argumentasi, keduanya mengklaim bahwa calon yang mereka dukunglah yang lebih baik.

Mengenai sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden tahun 2019 terutama pada isu identitas agama, menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Kota Palembang yang termasuk dalam ketiga jenis sikap politik tersebut, yakni apatis, spectator dan gladiator. Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 8 masyarakat Kota Palembang mengarah ke sikap politik apatis, beberapa masyarakat Kota Palembang yang termasuk dalam jenis sikap politik apatis adalah orang-orang yang baru memilih (pemilih pemula) dan tidak tertarik akan hal-hal yang berbau politik, tetapi ada juga yang bersikap apatis dikarenakan disibukkan oleh pekerjaan maupun tidak tertarik akan politik.

Kemudian dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ada 14 masyarakat Kota Palembang yang termasuk dalam jenis sikap politik spectator, adalah mereka yang hanya mengetahui, melihat, dan mendengar isu pada pemilihan presiden tahun 2019 terutama isu identitas agama di media sosial, media elektronik, media online maupun obrolan sehari-hari tanpa langsung mendukung salah satu pasangan calon. Peneliti juga menemukan salah seorang masyarakat Kota Palembang yang termasuk dalam pemilih pemula, tetapi ia sedikit banyaknya mengetahui isu pada pemilihan presiden tahun 2019 dikarenakan faktor lingkungannya.

Terakhir, terdapat 2 masyarakat Kota Palembang yang termasuk dalam jenis sikap politik gladiator, adalah mereka yang mengetahui,

megikuti, melihat dan mendengar isu pada pemilihan presiden tahun 2019 terutama isu tentang agama serta secara fanatik memberikan dukungan dan mengkampanyekan masing-masing pasangan calon yang berbeda. Dalam hal ini pun ditemukan hal yang menarik, yakni apabila kedua pendukung masing-masing pasangan calon di pertemukan, dan keduanya berdialog membahas mengenai isu yang dituduhkan kepada calon yang mereka dukung, maka yang terjadi adalah pembenaraan argumentasi, keduanya mengklaim bahwa calon yang mereka dukunglah yang lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan mengenai isu identitas agama dan sikap politik masyarakat Kota Palembang pada pemilihan presiden yakni sebagai berikut:

1. Penggunaan-penggunaan isu pada pemilihan presiden tahun 2019 terutama isu identitas agama merupakan sesuatu yang sengaja dibentuk dan dibuat oleh kedua pendukung masing-masing calon, hal ini digunakan sebagai cara untuk menyerang lawan politiknya maupun mempertahankan elektabilitas guna mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, terutama suara pemilih muslim.
2. Isu identitas agama tersebut berkaitan dengan sikap politik masyarakat terutama pada masyarakat Kota Palembang, bahwa sikap politik masyarakat Kota Palembang dikelompokkan menjadi 3 sikap politik yakni, sikap politik apatis merupakan masyarakat yang baru memilih (pemilih pemula) dan tidak tertarik akan hal-hal yang berbau politik, serta ada juga yang disibukkan oleh pekerjaan, sikap politik spectator merupakan masyarakat yang hanya mengetahui, melihat, dan mendengar isu pada pemilihan presiden tahun 2019 terutama isu identitas agama, dan sikap politik gladiator merupakan masyarakat yang mengikuti, mengetahui dan mendengar pemberitaan terutama tentang isu identitas agama serta secara

fanatik memberikan dukungan dan mengkampanyekan masing-masing pasangan calon yang berbeda pada pemilihan presiden tahun 2019.

B. SARAN

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian ini, maka peneliti bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat maupun untuk penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

Peneliti menyarankan untuk para calon-calon pemimpin di negeri ini agar lebih bisa membatasi penggunaan politik identitas terutama identitas agama, karena memungkinkan terjadinya perpecahan atau pembelahan seperti sekarang. Seharusnya calon pemimpin di negeri ini dapat memberikan gagasan-gagasan yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada penggunaan politik identitas.

Hal yang harus dilakukan masyarakat pun yakni harus cerdas dalam menilai atau melihat sesuatu, seperti dalam kasus pada pemilihan presiden 2019 terutama isu identitas agama. Seharusnya masyarakat dapat menelaah terlebih dahulu isu-isu yang ada, bukan langsung menelan secara keseluruhan hal tersebut.

Selanjutnya, peneliti mengharapkan agar lebih banyak lagi peneliti-peneliti yang mengkaji penelitian yang sejenis serta mengkaji lebih banyak lagi referensi yang terkait guna menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Afala, Laode Machdani, (2018), *Politik Identitas di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Almond, Gabriel dan Sidney Verba, (1990), *Budaya Politik*, Jakarta: Bina Aksara.
- Budiardjo, Miriam, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik (ed. revisi)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harrison, Lisa, 2007, *Metodologi Penelitian Politik (Edisi Pertama)*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama,
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, (2015), *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maarif, Ahmad Syafii, (2010), *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).
- Milbrath, L. dan M. Goel, (1977) *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics, ed. ke-2*, Chicago, III: Rind McMally.
- Newton, Kenneth dan Jan W. van Deth, (2016), *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta*, Bandung: Nusa Media,
- Pokja Sanitasi Kota Palembang, (2010), *Buku Putih Sanitasi Kota Palembang: Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)*.
- Pulungan, J. Suyuthi, (2014), *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sastroatmodjo, Sudijono, (1995), *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Suryanto, Bagong dan Sutinah, (2005), *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan (Edisi Ketiga)*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Widayanti, Titik, (2009), *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*, Yogyakarta: Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.

JURNAL, ARTIKEL, SKRIPSI.

Abidin, Min Hajul, (2017), *Politik Identitas Santri*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Sunan Kalijaga.

Afriana, Lintang Yunita, (2016), *Sikap Politik Anak Punk Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015*, Bandar Lampung: FISIP Universitas Lampung.

Fernandes, Arya, (2018), *Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Khiyarah, Miftahul, (2017), *Genealogi Dan Politik Identitas (Studi Terhadap Konflik Mahasiswa Palopo Dan Bonedi Universitas Muslim Indonesia)*, Makasar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin.

Novrianti, Ellsa Rizki, (2019), *Strategi Presentasi Diri Melalui Pencantuman Nama Keluarga Dalam Iklan Kampanye Caleg di Kota Palembang Tahun 2019*, Palembang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah.

Purwanti, Tanti, (2016), *Heterogenitas Etnik Dalam Pilkada Luwu Timur Tahun 2015*, Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Sahalatua, Andy Prima, (2018), *Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 2022*, Banten: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sari, Endang, (2016), *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*, Vol. 2, No. 2, Makassar: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Zharfandy, Irfan, (2016), *Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Zuhro, R. Siti, (2019), *Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019*, Volume 16 No. 1, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

INTERNET:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang (2017), *Letak Geografis dan Batas Wilayah Kota Palembang*, <https://palembangkota.bps.go.id>, diakses pada 5 November 2019.

Badan Pusat Statistik Kota Palembang, (2019), *Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2015-2018*, <https://palembangkota.bps.go.id>, diakses pada 5 November 2019.

Badan Pusat Statistik Kota Palembang, (2015), *Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2014*, <https://palembangkota.bps.go.id>, diakses pada 5 November 2019.

Badan Pusat Statistik Kota Palembang, (2019), *Jumlah Penduduk Miskin di Kota Palembang Tahun 2012-2018*, <https://palembangkota.bps.go.id>, diakses pada 5 November 2019

Bernie, Mohammad, (2018), *GNPF Ulama Resmi Dukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019*, <https://tirto.id>, diakses pada 25 Oktober 2019.

Hadiz, Vedi, (2019), *Pilpres 2019 di Pusaran Oligarki, Politik Uang, dan Isu Agama*, <https://www.matamatapolitik.com>, diakses pada 30 Agustus 2019.

Intan, Ghita, (2019), *Politisasi Agama Kental Warnai Pemilu 2019*, <https://www.voaindonesia.com>, diakses pada 10 Januari 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), (2019), <https://pemilu2019.kpu.go.id>, diakses pada 7 November 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), (2019), *Rekapitulasi Pilpres 2019 Wilayah Pemilihan Kota Palembang*, <https://pemilu2019.kpu.go.id>, diakses pada 10 November 2019.

Siregar, Raja Adil, (2019), *Rekapitulasi KPU di Palembang: Jokowi-Ma'ruf 38,52% Prabowo-Sandi 61,48%*, <https://news.detik.com/>, diakses pada 29 Oktober 2019.

Tambunan, R Hady Syahputra, (2019), *Pilpres 2019 dan Agama*, <https://www.kompasiana.com>, diakses pada 30 Agustus 2019.

Teguh, Irfan, (2019), Prabowo, *Isu Khilafah, dan Sejarah Gerakan Islam Politik Indonesia*, <https://tirto.id>, diakses ada 11 Januari 2020.

HALAMAN LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara;
2. Dokumentasi Penelitian;
3. Lampiran Lainnya.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk Tokoh Agama Kota Palembang.

1. Bagaimana pendapat anda tentang pemilihan presiden tahun 2019?
2. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali isu yang berkembang pada saat pemilihan presiden 2019 yang lalu, khususnya isu tentang agama. bagaimana pendapat Anda tentang itu?
3. Menurut Anda hal apakah yang mempengaruhi timbulnya politik identitas agama pada pilpres 2019?
4. Ada isu yang menyebutkan bahwa Jokowi adalah sosok yang paling dekat dengan ulama dan dianggap paling islami dan sebaliknya Prabowo adalah sosok yang paling dekat dengan ulama dan dianggap paling islami. Bagaimana pendapat Anda akan hal itu?
5. Apakah isu identitas agama tersebut mempengaruhi sikap Anda untuk menentukan suara dalam pemilihan presiden tahun 2019?

Pedoman wawancara untuk masyarakat Kota Palembang.

1. Apakah Anda ikut serta dalam pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang pemilihan presiden tahun 2019?
3. Apakah Anda mengikuti perkembangan mengenai informasi-informasi pada pemilihan presiden 2019 saat itu?
4. Dimana Anda mendapatkan perkembangan informasi tentang pemilihan presiden 2019 tersebut?
5. Apakah Anda tahu isu-isu pada saat menjelang pemilihan presiden 2019 yang lalu? isu seperti apa?
6. Apakah Anda mengetahui isu identitas agama menjelang pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu? Isu seperti apa?
7. Bagaimana pendapat Anda tentang itu?
8. Menurut Anda hal apakah yang mempengaruhi timbulnya politik identitas agama pada pilpres 2019?
9. Apakah isu identitas agama tersebut mempengaruhi sikap Anda untuk menentukan suara dalam pemilihan presiden tahun 2019?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Tokoh Muhammadiyah Kota Palembang (IW).



Wawancara dengan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Palembang (IS).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (YR).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (MF).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (SU).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (SM).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (RK)



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (FF).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (PA).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (MA).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (ST).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (DA).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (FM).



Wawancara dengan Masyarakat Kota Palembang (AZ).



Wawancara dengan Masyarakat Kota Palembang (MR).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (SA).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (AM).



Wawancara dengan masyarakat Kota Palembang (MA).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.1925/Un.09/VIII/PP.01/11/2019
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
- 1 Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu di bimbing oleh tenaga Ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka menyelesaikan penyusunan skrip
 - 2 Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 - 3 Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik **an: Fauzan Agam, Tanggal 1 November 2019**
- MENGINGAT :**
- 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 - 2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000
 - 3 Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 - 4 Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 - 5 Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016
 - 6 Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama :

Menunjuk Saudara:

| N A M A | NIP/NIDN | Sebagai |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| Dr. Kun Budiarto, M.Si | 197612072007011010 | Pembimbing I |
| Mariatul Qibtiyah, MA.Si | 2011049001 | Pembimbing II |

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing Sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saudara :

| | |
|---------------|---|
| N a m a | : Fauzan Agam |
| N I M | : 1527020007 |
| Prodi | : Ilmu Politik |
| Judul Skripsi | : Isu Identitas Agama pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Terhadap Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang |

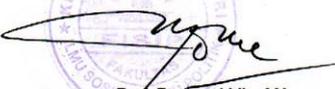
Masa bimbingan : **Satu Tahun TMT. 7 November 2019 s/d 7 November 2020**

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan:

1. Rektor ;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Palembang, 7 November 2019
Dekan,


Prof. Dr. izomiddin, MA
NIP.196206201988031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI POLITIK
PEMBIMBING I**

Nama Mahasiswa : Fauzan Agam A.Z.
 NIM : 1527020007
 Program Studi : Ilmu Politik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Isu Identitas Agama pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Terhadap Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang
 Pembimbing I : Dr. Kun Budianto, M.Si
 Pembimbing II :

| No. | Hari/ Tanggal | Uraian Materi yang Dikonsultasikan | Tandatangan Pembimbing |
|-----|------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Senin 4. November 2019 | ACC Bab I dan Konsultasi Bab II | |
| 2 | Kamis 14 Nov. 2019 | Konsultasi BAB II | |
| 3 | 18 Nov. 2019 Senin | ACC Bab II | |
| 4 | Selasa 19 Nov. 2019 | Konsul Bab III Analisis Instrumentalis dan Srup Politik Masyarakat Kota PLG | |
| 5 | 1 Januari 2020 Rabu | Konsul Bab III dan Bab IV | |
| 6 | Jumat 17 Januari | ACC Bab III dan Perbaikan Bab IV | |
| 7 | Acc Senin 20 Januari 2020 | ACC dilanjutkan ke Komprehensif | |



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal AbidinFikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website :www.radenfatah.ac.id

| No. | Hari / Tanggal | Uraian Materi yang Dikonsultasikan | Tandatangan Pembimbing |
|-----|--------------------------|------------------------------------|---|
| 8 | Senin 22 Januari 2020 | ACC Ujian Munqasah |  |



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry No.1 Km.3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI POLITIK
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : Fauzan Agam A.Z.
 NIM : 1527020007
 Program Studi : Ilmu Politik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Isu Identitas Agama pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Terhadap Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang
 Pembimbing I :
 Pembimbing II : Mariatul Qibtiya, MA.Si

| No. | Hari/ Tanggal | Uraian Materi yang Dikonsultasikan | Tandatangan Pembimbing |
|-----|--------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Jumat 1 November 2019 | ACC Proposal dan SK Pembimbing | |
| 2 | Jumat 8 November 2019 | Konsultasi BAB I | |
| 3 | Senin 18 Nov. 2019 | Perbaikan Latar belakang dan teori Instrumentalisme | |
| 4 | Jumat 22 Nov. 2019 | ACC Bab I dan konsul Bab II | |
| 5 | 25 Nov 2019 Senin | Perbaikan Bab II | |
| 6 | 29 Nov 2019 Jumat | Revisi Bab II dan konsul Bab III | |
| 7 | 2 Des 2019 Senin | ACC Bab II dan Perbaikan bab III | |
| 8 | Senin 9 Des 2019 | Revisi Bab III (Pedoman wawancara) | |



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

| No. | Hari / Tanggal | Uraian Materi yang Dikonsultasikan | Tandatangan Pembimbing |
|-----|------------------------------|--|------------------------|
| 9 | Senin 16 Desember | Konsultasi Hasil wawancara | |
| 10 | Jumat 20 Desember 2019 | Konsultasi Hasil wawancara | |
| 11 | Senin 23 Desember 2019 | Konsul Hasil wawancara dan Perbaikan Bab III | |
| 12 | Senin 6 Januari 2020 | Perbaikan analisis Bab III dan Konsul Bab IV | |
| 13 | Senin 13 Januari 2020 | Perbaikan analisis bab III, IV dan Konsul Abstrak | |
| 14 | Jumat 17 Januari 2020 | ace skripsi. lanjut ujian !! | |



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.83 /Un.09/VIII/TL.01/01/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

9 Januari 2020

Kepada Yth
Tokoh NU Kota Palembang
Di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Fauzam Agam
NIM : 1527020007
Semester : VII(Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Isu Identitas Agama Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Terhadap Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



Dekan,
Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan
1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.83 /Un.09/VIII/TL.01/01/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

9 Januari 2020

Kepada Yth
Tokoh Muhammadiyah Kota Palembang
Di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Fauzam Agam
NIM : 1527020007
Semester : VII(Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Isu Identitas Agama Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Terhadap Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



Dekan,

[Signature]
Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan
1.Ka.Prodi Ilmu Politik
2.Mahasiswa yang bersangkutan
3.Arsip



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.83 /Un.09/VIII/TL.01/01/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

9 Januari 2020

Kepada Yth
Tokoh Masyarakat Kota Palembang
Di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Fauzam Agam
NIM : 1527020007
Semester : VII(Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Isu Identitas Agama Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Terhadap Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan
1. Ka. Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website: www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 27 bulan 01 tahun 2020 Skripsi Mahasiswa :
 Nama : Fauzan Agam
 Nomor Induk Mahasiswa : 1527020007
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Isu Idmktas Agama Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang .

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini..... maka saudara dinyatakan : **LULUS/ TIDAK LULUS**,
 Indeks Prestasi Kumulatif* : 3.19..., oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (SI) **Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)**.
2. Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

| NO. | TEAM PENGUJI | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | <u>Reza Aprianti, MA</u> | Ketua Penguji | |
| 2 | <u>Gita Astrid, M.si</u> | Sekretaris Penguji | |
| 3 | <u>Taufik Akhyar, M.si</u> | Penguji Utama | |
| 4 | <u>Apriz Musthofa Kawwami, M.Sos</u> | Penguji Kedua | |
| 5 | <u>Pr. Kun Budianto, M.si</u> | Pembimbing I | |
| 6 | <u>Mariatul Cibiryan, MA.Si</u> | Pembimbing II | |

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 27-01-2020

KETUA,

Reza Aprianti, MA
 NIP. 19850223201112004

SEKRETARIS,

Gita Astrid, M.si
 NIDN. 2025128703

BLANKO MUNAQAASYAH



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Fauzan Agam
NIM : 1527020007
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : ISU Identitas Agama pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan sikap Politik Masyarakat Kota Palembang.

Telah dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 27 bulan 01 tahun 2020
dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** Dengan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,47

Palembang,

Ketua,


Reza Aprianti, MA
NIP. 19850223201112004

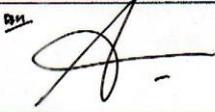
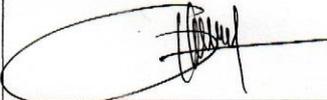
Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Fauzan Agam A.2
 NIM : 1527020007
 Program Studi : Ilmu Politik
 Tanggal Ujian Munaqosah : 27 Januari 2020
 Judul Skripsi : Isu Identitas agama dan Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

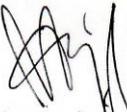
TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQOSAH dan TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI I dan DOSEN PENGUJI II.

| NO. | NAMA DOSEN PENGUJI | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | Taufik Akhyar, M.Si | Penguji I |  |
| 2 | AFIF Musthofa Kawwami, M.Sos | Penguji II |  |

Palembang, 03 - Februari - 2020

Menyetujui,


 Dr. Kun Budianto, M. Si
 Dosen Pembimbing I


 Mariatul Ghibiyah, MA. Si
 Dosen Pembimbing II